



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG NEGARA PURWOKERTO

DJKN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

JALAN PAHLAWAN NOMOR 876 PURWOKERTO 53143
TELEPON : (0281) 630454; FAKSIMILE : (0281) 630451; SUREL : kpnlpurwokerto@kemenkeu.go.id

*Senantiasa Melayani Anda dengan penuh PESONA
Profesionalisme, Efisien dan Efektif, Sinergi, Optimal, Nyaman dan Amanah*

KATA PENGANTAR

Dalam upaya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga *good governance* yang merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara dapat terlaksana. Untuk itu setiap tahun anggaran berakhir instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan rencana strategis (renstra) yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam hal ini renstra tahun 2020 s.d. tahun 2024.

Menindaklanjuti hal itu maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, KPKNL Purwokerto menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan maksud untuk mengukur kinerja KPKNL Purwokerto itu sendiri selama tahun anggaran 2021 sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas berdasarkan visi yang diembannya selama ini yaitu : “*MENJADI PENGELOLA KEKAYAAN NEGARA YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT*”.

Pada tahun 2021 capaian kinerja KPKNL Purwokerto baik, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 114,08% yang terdiri dari *Stakeholder Perspective* 30%, *Customer Perspective* 17,06%, *Internal Process Perspective* 33,15% dan *Learning & Growth Perspective* 33,87%. Capaian tersebut merupakan kontribusi menyeluruh dari semua Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Purwokerto yang telah dilaksanakan oleh semua subbagian, seksi-seksi dan fungsional, sehingga secara keseluruhan capaian kinerja KPKNL Purwokerto dapat tercapai dengan baik. Dalam kondisi pandemi *covid-19*, KPKNL Purwokerto tetap dituntut dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, dengan menjalankan protokol kesehatan, baik dilingkungan kantor maupun pada saat menjalankan tugas di luar kantor, sehingga pelayanan kepada *stakeholder* dapat berjalan baik.

Laporan Kinerja ini tersusun berkat kerja keras dan ketekunan para pihak yang terlibat dalam hal penyajian data yang diperlukan dan pengolahannya, untuk itu kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja sama yang baik. Selanjutnya agar laporan ini dapat dipakai sebagai umpan balik dalam meningkatkan kinerja secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan dilandasi prinsip CARE (*Committed, Able, Responsive, and Enthusiastic*) serta dilandasi pula oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, maka tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan.

Akhirnya dengan segala kekurangan yang ada, kami berharap Laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang memerlukan, disamping sebagai tolak ukur kegiatan saat ini dan masa yang akan datang.

Purwokerto, 10 Januari 2022

Kepala Kantor



Y. Soeparjanto

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPKNL Purwokerto ini disusun sebagai bagian dari perwujudan praktek *good governance* khususnya di lingkungan KPKNL Purwokerto dan sebagai laporan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/Rencana Kerja Tahun 2021. Di samping itu selain berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, juga akan bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pada tahun anggaran 2021, dari 10 sasaran strategis dengan 20 Indikator Kinerja Utama yang ditargetkan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2021, seluruhnya dapat dilaksanakan dengan hasil yang baik yakni sebesar 114,08% untuk Capaian Nilai Kinerja Organisasi. Dalam upaya mewujudkan sasaran-sasaran ini KPKNL Purwokerto yang pada tahun 2021 mendapatkan alokasi dana DIPA (non belanja pegawai) sebesar Rp1.471.930.000,00 dapat kami realisasikan sebesar Rp1.422.387.273,00 atau 96,63%.

Dengan terwujudnya sasaran-sasaran tersebut diharapkan pada akhirnya dapat memenuhi visi dan misi KPKNL Purwokerto. Capaian Kinerja dari 10 Sasaran Strategis dengan 20 IKU yang dilaksanakan KPKNL Purwokerto selama tahun 2021 menurut masing-masing perspektif dapat kami gambarkan sebagai berikut :

1. *Stakeholder Perspective* dengan bobot IKU 25% tercapai sebesar 30%;
2. *Customer Perspective* dengan bobot IKU 15% tercapai sebesar 17,06%;
3. *Internal Process Perspective* dengan bobot IKU 30% tercapai 33,15%;
4. *Learning and Growth Perspective* dengan bobot IKU 30% tercapai 33,87%;

Hasil capaian indikator kinerja utama sudah cukup baik namun demikian masih terdapat permasalahan atau hambatan yang menonjol pada tahun 2021 yaitu :

1. Dalam proses sertifikasi BMN, satker tidak mudah dalam melengkapi persyaratan seperti surat pelepasan hak dan tanda tangan dari para ahli waris karena pemilik asal sudah meninggal dunia serta perlu waktu lama dalam proses pengajuan sertifikasi ke kantor pertanahan karena kelengkapan dokumen dan pengukuran bidang tanahnya;
2. Penyampaian dokumen permohonan oleh *stakeholder* yang tidak lengkap sehingga menghambat layanan unggulan;
3. Perbedaan persepsi kelengkapan dokumen antara Satker dan Kantor Pertanahan;

4. Belum ada aturan tegas mengenai sanksi terhadap satker-satker yang belum/tidak melakukan pelaporan;
5. Penyerahan BKPN dari Kantor Pusat tidak dilengkapi dengan dokumen yang memadai yang memiliki kekuatan hukum;
6. Rendahnya kesadaran debitur dalam penyelesaian piutangnya;
7. Masih banyak outstanding BKPN lama dan banyak BKPN yang tidak memiliki barang jaminan;
8. Tidak adanya jaminan perlindungan kepada pelaksana eksekusi;
9. Banyaknya permohonan lelang yang belum lengkap saat diajukan;
10. Banyaknya lelang Tidak Ada Penawaran (TAP);
11. Banyaknya lelang yang dibatalkan oleh pemohon lelang karena pelunasan oleh debitur;
12. Masih rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti lelang;
13. Menurunnya daya beli masyarakat karena situasi politik, lokasi yang tidak *marketable*, lelang Hak Tanggungan yang masih terkendala pengosongan, kondisi pandemi covid-19;
14. Wilayah kerja KPKNL Purwokerto yang cukup luas yang meliputi 7 kabupaten menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas.

Untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang perlu dirumuskan strategi pemecahan masalah antara lain :

1. Meningkatkan mutu layanan menuju pelayanan prima, dan profesional kepada *stakeholder* dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan utilisasi Kekayaan Negara;
2. Rapat koordinasi antara Kantor Pertanahan, Satker dan DJKN untuk mencapai kesepakatan mendasar terhadap kendala-kendala yang dihadapi
3. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, mengutilisasi Kekayaan Negara dan melakukan sertifikasi BMN;
4. Melakukan program pendataan, verifikasi dan sertifikasi aset BMN berupa tanah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional;
5. Sosialisasi kepada satker terkait proses pengelolaan kekayaan negara terutama profiling calon penyewa.
6. Melakukan koordinasi dengan satker terkait penyelesaian BKPN;
7. Percepatan Penyelesaian Piutang Negara melalui *Crash Program*

8. Mengadakan Sosialisasi Lelang Pasal 6 UUHT sesuai PMK No. 213/PMK.06/2020 kepada kepada Pihak Perbankan dan Lembaga Keuangan di Wilayah Kerja KPKNL Purwokerto dan sosialisasi lelang *e-auction*;
9. Melaksanakan Sosialisasi Permohonan lelang online dan ketentuan lelang kepada satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Purwokerto
10. Melaksanakan koordinasi dengan Pemohon Lelang terkait syarat-syarat permohonan lelang yang harus dipenuhi, terutama lelang Hak Tanggungan dalam dalam upaya pencapaian target organisasi terutama produktivitas lelang melalui permohonan sukarela khususnya lelang UMKM dari Perbankan.;
11. Melaksanakan penggalian potensi lelang sukarela;
12. Optimalisasi penggunaan aplikasi TIK dalam mendukung tugas dan fungsi diantaranya *e-auction* (Pelayanan Lelang) dan SIMAN (Pengelolaan Kekayaan Negara);
13. Menyelenggarakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada *stakeholder* dalam rangka peningkatan pemahaman atas peraturan terkait seluruh tugas dan fungsi KPKNL;
14. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Wilayah, Kantor Pusat dan unit kerja eksternal baik instansi vertikal maupun Pemerintah Daerah;
15. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terkait pengelolaan manajemen kinerja dan penerapan mitigasi risiko serta kepatuhan internal;
16. Mengoptimalkan kinerja pegawai melalui kegiatan yang bersifat lintas unit;
17. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan menugaskan para pegawai untuk mengikuti berbagai diklat agar menjadi pegawai multi talenta;
18. Pelaksanaan *capacity building* internal pegawai KPKNL Purwokerto secara berkala;
19. Memberikan motivasi kepada para pegawai sehingga tercipta suasana kerja harmonis dan bersemangat untuk melebihi capaian target;
20. Melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan, penerapan budaya kerja untuk mendukung Transformasi Kelembagaan;

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
	B. Peran Strategis
	C. Sistematika Laporan
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	A. Penetapan Kinerja
	B. Pengukuran Kinerja
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	A. Capaian Indikator Kinerja Utama
	B. Evaluasi dan Analisis Kinerja
	C. Realisasi Anggaran
BAB IV	PENUTUP

Daftar Lampiran :

- A. Kontrak Kinerja KPKNL Purwokerto tahun 2021
- B. Lembar Penetapan Manual IKU
- C. Manual Indikator Kinerja Utama Tahun 2021
- D. Lembar Penetapan Addendum Manual IKU
- E. Manual Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 (setelah Adendum)
- F. Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Purwokerto tahun 2021

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

Sebagai kantor pelayanan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto menyelenggarakan fungsi :

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan Negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto dipimpin oleh seorang Kepala, dengan susunan organisasi :

- a. Subbagian Umum.
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara.
- c. Seksi Piutang Negara.
- d. Seksi Hukum dan Informasi.
- e. Seksi Kepatuhan Internal
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil, Jabatan Fungsional Pelelang, dan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto meliputi wilayah Kabupaten :

- | | |
|-----------------|--------------|
| a. Banyumas | e. Cilacap |
| b. Banjarnegara | f. Purworejo |
| c. Purbalingga | g. Wonosobo |
| d. Kebumen | |

Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Purwokerto pada tahun 2021 didukung oleh 45 orang pegawai dengan posisi sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Kepala Kantor | : 1 orang |
| b. Kepala Sub Bagian Umum | : 1 orang dan 12 orang staf |
| c. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara | : 1 orang dan 8 orang staf |
| d. Kepala Seksi Piutang Negara | : 1 orang dan 3 orang staf |
| e. Kepala Seksi Hukum dan Informasi | : 1 orang dan 6 orang staf |
| f. Kepala Seksi Kepatuhan Internal | : 1 orang dan 3 orang staf |
| g. Pejabat Fungsional Pelelang | : 3 orang staf |
| h. Pejabat Fungsional Penilai | : 3 orang staf |
| i. Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil | : 1 orang staf |

Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan (posisi tahun 2021) sebagai berikut:

NO	UNIT	GOLONGAN/RUANG										JUMLAH
		II				III				IV		
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	
1	Kepala Kantor										1	1
2	Subbag Umum	1			2	3	5	1	1			13
3	Seksi PKN				1		4	1	3			9
4	Seksi Piutang Negara					1	2		1			4
5	Seksi Hukum dan Informasi					1	3	1	1	1		7
6	Seksi Kepatuhan Internal					1	2		1			4
7	Pejabat Fungsional Pelelang						1	1	1			3
8	Pejabat Fungsional Penilai						2		1			3
9	Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil			1								1
	JUMLAH	1	-	1	3	6	19	4	9	1	1	45

Komposisi pegawai pada tahun 2021 berdasarkan tingkat pendidikan formal terakhir sebagai berikut :

NO	UNIT	JENJANG PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SMA	D1	D3	DIV/S1	S2	
1	Kepala Kantor						1	1
2	Subbag Umum	1	2	1	2	7		13
3	Seksi PKN		1			7	1	9
4	Seksi Piutang Negara		1		1	2		4
5	Seksi Hukum dan Informasi			1	1	4	1	7
6	Seksi Kepatuhan Internal			1		3		4
7	Pejabat Fungsional Pelelang					2	1	3
8	Pejabat Fungsional Penilai					2	1	3
9	Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil				1			1
	JUMLAH	1	4	3	5	27	5	45

B. PERAN STRATEGIS

Sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL memiliki peran strategis sebagai berikut :

1. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Purwokerto memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara. Sebagai *asset manager*, KPKNL Purwokerto mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN melalui optimalisasi aset dalam bentuk peningkatan pendapatan negara, serta penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

2. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis di bidang pengurusan piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara dengan mentransformasikan *Non Performing Loan* menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan, dan sebab apapun.

3. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset di muka umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Purwokerto secara terus menerus mengupayakan penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun noneksekusi sehingga diharapkan lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*). Selain

itu, lelang merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. Dengan keuntungan yang ditawarkan tersebut diharapkan KPKNL dapat ikut berperan mendukung penyelesaian kredit macet maupun *disposal asset*. DJKN dalam hal ini KPKNL Purwokerto diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, maka metode penjualan melalui lelang juga turut berkembang, salah satunya implementasi penjualan lelang melalui aplikasi *e-auction*. Lelang melalui *e-auction* menjadi salah satu terobosan yang dilakukan guna menjawab perkembangan teknologi dan pola pikir masyarakat yang semakin maju dalam melakukan penjualan barang. Salah satu keunggulan *e-auction* yakni pelaksanaan lelang menjadi lebih praktis karena peminat lelang dapat menawar dari mana saja, tanpa perlu hadir langsung.

4. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ke Kas Negara

Dalam memberikan pelayanan pengelolaan piutang negara, DJKN melalui KPKNL Purwokerto memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) Pengelolaan Piutang Negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, memperoleh hasil bea lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Melalui optimalisasi pengelolaan BMN berupa pemanfaatan juga dapat meningkatkan penerimaan negara berupa PNBP.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian LAPORAN KINERJA KPKNL Purwokerto Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, dan langkah-langkah antisipatif yang diambil.

Bab I. Pendahuluan, yang menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, dan peran strategis, serta sistematika laporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja, yang menguraikan tentang rencana strategis dan penetapan kinerja KPKNL Purwokerto Tahun 2021.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang pengukuran, sasaran, dan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis KPKNL Purwokerto Tahun 2021.

Bab IV. Penutup, yang menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan, selama tahun 2021, KPKNL Purwokerto telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II laporan ini. Dengan disusunnya LAPORAN KINERJA KPKNL Purwokerto Tahun 2021 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja KPKNL Purwokerto di tahun yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN KINERJA

Sesuai kontrak Kinerja antara Kepala KPKNL Purwokerto dengan Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta yang ditandatangani pada tanggal 29 Januari 2021, maka KPKNL Purwokerto diberikan tugas untuk dapat mencapai target yang telah disepakati untuk tahun 2021.

Peta Strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara



Gambar 2.1 Peta Strategi DJKN

Jelas tergambar dari Peta Strategi diatas bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai 10 sasaran strategis yang terbagi dalam 4 *perspective* yang masing-masing sasaran strategis tersebut dijabarkan lagi kedalam Indikator Kinerja Utama sebagai kinerja yang harus dicapai dalam tahun bersangkutan. Peta Strategi tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 KPKNL Purwokerto sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 (ADDENDUM)
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%
		1c-CP Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	88

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		2b-CP	Persentase realisasi pokok Lelang	100%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,3
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%
4b-CP		Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	
4c-CP		Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%	
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%
5b-CP		Persentase produktivitas lelang	35%	
5c-CP		Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		5d-CP Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	12,5%
6.	Edukasi yang efektif	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	89
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan Negara	85%
8	SDM yang kompeten	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9	Organisasi yang fit-for-purpose	9a-N Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan asset	85
		9b-N Nilai Review Pengelolaan Kinerja	75
		9c-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

Tabel 2.1 Kontrak Kinerja KPKNL Purwokerto Tahun 2021

B. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja KPKNL Purwokerto Tahun 2021, kami mengacu pada DJKN yang berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120 dan angka minimum adalah 0
2. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU.

Hijau	Kuning	Merah
$100 \leq X \leq 120$ Memenuhi ekspektasi	$80 \leq X < 100$ Belum memenuhi ekspektasi	$X < 80$ Tidak memenuhi ekspektasi

3. Apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120.
4. Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

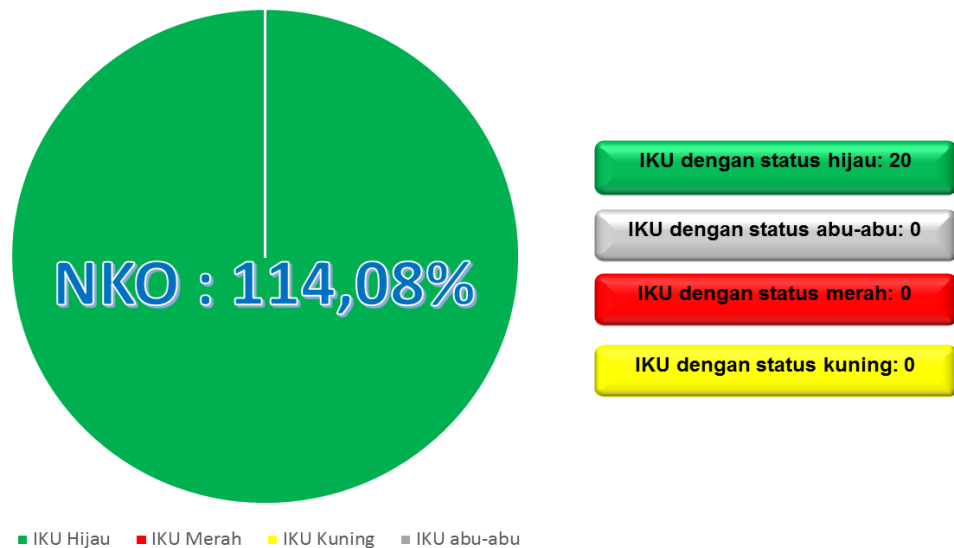
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sesuai Kontrak Kinerja tahun 2021 KPKNL Purwokerto mempunyai 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu *Three*. Rincian capaian kinerja Kemenkeu *Three* KPKNL Purwokerto Tahun 2021 seperti telah disajikan pada tabel 2.1.

Hasil pencapaian kinerja KPKNL Purwokerto di jabarkan pada gambar dan tabel berikut ini :



IKHTISAR CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV 2021 KPKNL PURWOKERTO



Gambar 2.2 Ikhtisar Capaian Kinerja KPKNL Purwokerto

Dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU), semua IKU dapat mencapai target dengan status hijau dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi sebesar 114,08%.

Capaian Kinerja KPKNL Purwokerto Tahun 2021 disajikan secara lengkap pada tabel berikut ini :

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
KPKNL PURWOKERTO
TAHUN 2021**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian IKU
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	76,63%	120%
		1b-CP Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	130,05%	120%
		1c-CP Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	100%	162%	120%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	88	98,26	111,66%
		2b-CP Persentase realisasi pokok Lelang	100%	174,36%	174,36%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,3	4,78	111,16%
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan	4a-CP Persentase bidang tanah	100%	124,40%	120%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian IKU
	Negara dan Penilaian yang Efektif	BMN yang disertifikatkan			
		4b-CP Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	122,22%	120%
		4c-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%	0,23%	120%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%	106,96%	106,96%
		5b-CP Persentase produktivitas lelang	35%	39,67%	113,34%
		5c-CP Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	92%	108,70%
		5d-CP Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	12,5%	0,01%	120%
6.	Edukasi yang efektif	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	89	93,51%	105,07%
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan	85%	89,01%	104,72%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian IKU
	efektif	pengelolaan kekayaan Negara			
8	SDM yang kompeten	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	120%
9	Organisasi yang fit-for-purpose	9a-N Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan asset	85	97,31	114,48%
		9b-N Nilai Review Pengelolaan Kinerja	75	94,25	120%
		9c-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	97,83	120%
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,99%	100,51%

Tabel 2.2 Capaian IKU KPKNL Purwokerto Tahun 2021

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi Capaian kinerja KPKNL Purwokerto selama Tahun 2017 s.d 2021 dapat di lihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal

KPKNL Purwokerto	SS: 1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							
	IKU: 1a-CP "Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK"							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	-	50%	50%	55%	55%	62%	62%	Max/TLK
Realisasi		70,57%	70,57%	77,48%	77,48%	76,63%	76,63%	
Capaian		120%	120%	120%	120%	120%	120%	

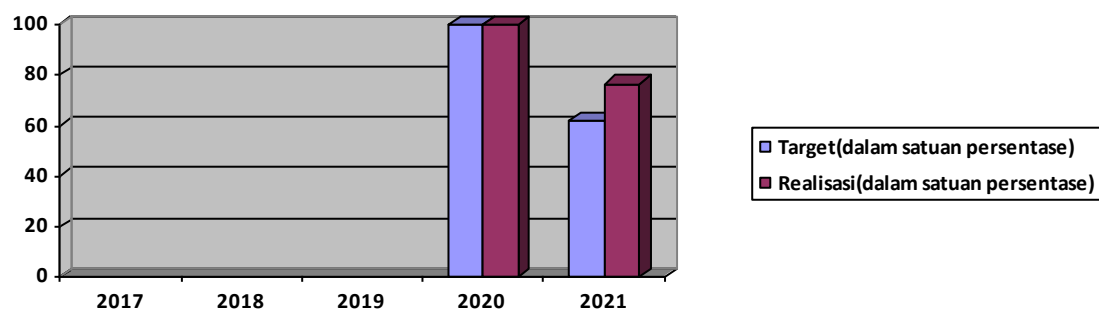
Catatan : IKU tersebut baru ditetapkan menjadi target pada tahun 2020

✓ Isu utama terkait kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK:

- Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru (2021) = 78,65
- Optimalisasi SBSK Tahun 2020 = 73,98

Evaluasi Capaian Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2017	2018	2019	2020	2021	Pol/ K P
Target				100%	62%	Max/
Realisasi				100%	76,63%	TLK
Capaian				120%	120%	



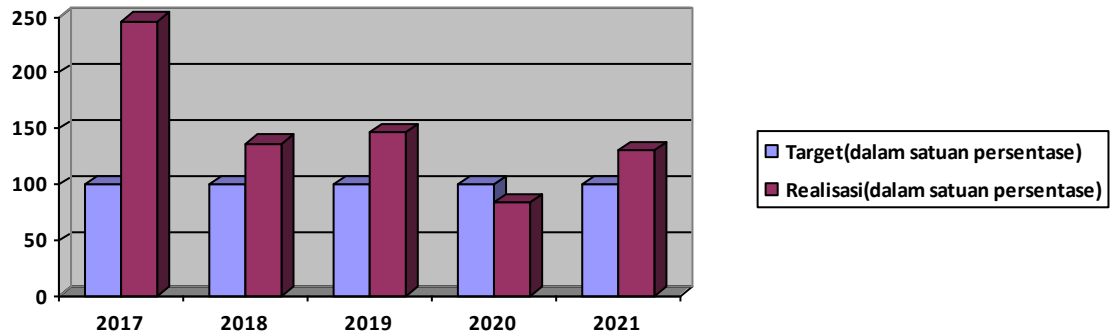
KPKNL Purwokerto	SS: 1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							
	IKU: 1b-CP "Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang"							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	16,86%	56,88%	56,88%	73,35%	73,35%	130,05%	130,05%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

- ✓ Isu utama terkait penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang :
 - Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang KPKNL Purwokerto s.d Desember 2021 adalah sebesar Rp. 10.989.032.554,00 atau sebesar 130,05% dari target, dengan rincian pencapaian sebagai berikut :
 - a. Realisasi nominal PNBPN Kekayaan Negara(BMN) sebesar Rp6.732.565.774,00 (162,23%) dari target sebesar Rp. 4.150.000.000,00;
 - b. Realisasi nominal PNBPN sebesar Rp 48.881.625,00 (349,15%) dari target sebesar Rp. 14.000.000,00;
 - c. Realisasi nominal PNBPN Lelang sebesar 4.207.585.155,00 (98,17%) dari target sebesar Rp. 4.286.000.000,00
- ✓ Akar masalah :
 - Keterlambatan laporan realisasi PNBPN dari KPPN di wilayah kerja KPKNL Purwokerto
 - Banyaknya lelang TAP
- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
 - Koordinasi dengan KPPN terkait laporan realisasi PNBPN yang diterima sesuai dengan wilayah kerjanya
 - Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Perbankan
 - Melaksanakan penggalan potensi lelang sukarela
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :
 - Koordinasi dengan KPPN yang terkait
 - Koordinasi dengan Pemohon Lelang untuk dapat memperbanyak potensi lelang Laku

Evaluasi Capaian Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2017	2018	2019	2020	2021	Po/ K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	Max/
Realisasi	246,43%	137,14%	146,72%	84,09%	130,05%	TLK
Capaian	120%	120%	120%	84,09%	120%	

Catatan : IKU tersebut baru ditetapkan menjadi target pada tahun 2017



KPKNL Purwokerto	SS: 1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							
	IKU: 1c-CP "Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (saldo PNDS s.d 2017)"							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Po/ K P
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Min/TLK
Realisasi	6%	111%	111%	109,61%	109,61%	162%	162%	
Capaian	22,02%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Catatan : IKU tersebut baru ditetapkan menjadi target pada tahun 2021

- ✓ Isu utama dan Implikasi terkait tingkat outstanding piutang negara (addendum):
 - Target Penurunan Outstanding PN tahun 2021 awalnya Rp. 359.254.343,00 telah diadendum menjadi Rp.450.000.000,00
 - Realisasi penurunan nilai outstanding piutang negara KPKNL Purwokerto s.d Desember tahun 2021 mencapai 162,16% atau sebesar Rp. 729.738.023,00
- ✓ Akar masalah
 - Masih banyak outstanding BKPN lama
 - Banyaknya BKPN yg tidak didukung Barang jaminan

- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
 - Melakukan penggalian potensi/mapping BKPN
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi
 - Intensifikasi pengurusan piutang Negara

2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

KPKNL Purwokerto	SS: 2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	IKU: 2a-CP "Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang"							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ KP
Target	88	88	88	88	88	88	88	Max/AVG
Realisasi	97,96	98,53	98,53	98,78	98,78	98,11	98,11	
Capaian	111,32%	111,97%	111,97%	112,25%	112,25%	111,49%	111,49%	

Catatan : IKU tersebut baru ditetapkan menjadi target pada tahun 2018

- ✓ Isu utama dan Implikasi terkait Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang :
 - Capaian IKU Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang KPKNL Purwokerto s.d Desember 2021 :
 1. Persetujuan/Penolakan Permohonan Sewa BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan (Integrasi Layanan) pada KPKNL = 96,59
 2. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL = 98,53
 3. Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL = 95,38
 4. Penetapan Jadwal Lelang = 93,06
 5. Pelayanan Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang = NIHIL
 6. Pelayanan Pemberian Kuitansi Pembayaran Harga Lelang = 100
 7. Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang dan Dokumen Kepemilikan Barang = 100
 8. Penyetoran Hasil Bersih Lelang (Kas Negara) = 100
 9. Penyetoran Hasil Bersih Lelang (selain Kas Negara) = 99,91

10. Pelayanan Permohonan Keringanan Utang pada KPKNL = 98,57
11. Pelayanan Permohonan Penarikan Pengurusan Piutang Negara = NIHIL
12. Pelayanan Permohonan Penebusan Barang Jaminan Senilai/di Atas Nilai Pengikatan = NIHIL
13. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas = 100
14. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai = NIHIL

✓ Akar Masalah :

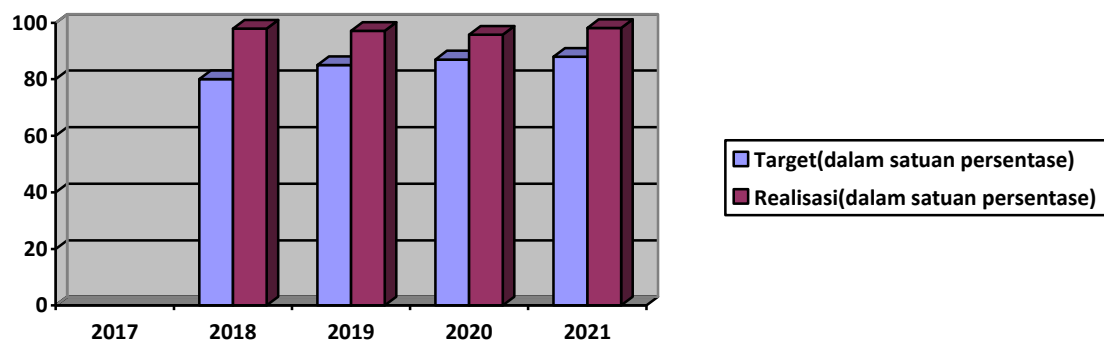
- Belum optimalnya sistem monitoring layanan pengelolaan PKN dan Lelang

✓ Rekomendasi Rencana Aksi :

- Sinkronisasi data aplikasi 'sepekan pelangi' dengan Nadine dan lelang.go.id

Evaluasi Capaian Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang Tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2017	2018	2019	2020	2021	Po/ K P
Target		89	85	87	88	Max/Sum
Realisasi		97,93	97,14	95,75	98,11	
Capaian		120%	114,28%	110,06%	111,49%	

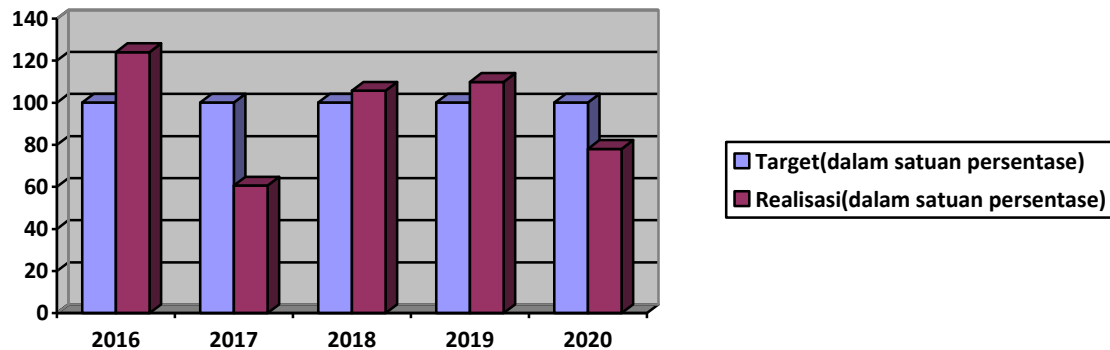


KPKNL Purwokerto	SS: 2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	IKU: 2b-CP "Persentase realisasi Pokok Lelang"							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	29,98%	79,68%	79,68%	111,87%	111,87%	174,36%	174,36%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

- ✓ Isu utama dan Implikasi terkait realisasi Pokok Lelang :
 - Realisasi capaian pokok lelang KPKNL Purwokerto s.d Desember Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 142.973.252.108,00 (174,36%) dari target sebesar Rp. 82.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Realisasi Pokok Lelang Kelas I sebesar Rp. 62.787.880.308,00 (133,59%) dari target sebesar Rp. 47.000.000.000,00
 2. Realisasi Pokok Lelang pegadaian sebesar Rp. 80.185.371.800,00(229,10%) dari target sebesar Rp. 35.000.000.000,00
- ✓ Akar Masalah :
 - Banyaknya lelang TAP
- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
 - Koordinasi dengan pemohon lelang untuk memprioritaskan Lelang Eksekusi yang potensial Laku
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :
 - Koordinasi dengan pemohon lelang untuk memprioritaskan Lelang Eksekusi yang potensial Laku
 - Posting pengumuman lelang di media sosial KPKNL Purwokerto

Evaluasi Capaian Persentase hasil lelang Tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2017	2018	2019	2020	2021	Pol/ K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	Max/Sum
Realisasi	60,69%	105,64%	109,87%	78,08%	174,36%	
Capaian	60,69%	105,64%	60,69%	78,08%	120%	



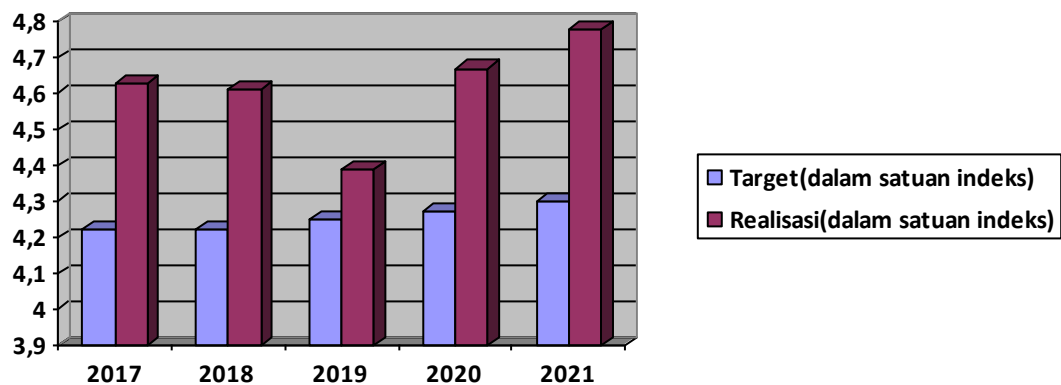
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien

KPKNL Purwokerto	SS: 3. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien							
	IKU: 3a-CP "Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL"							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target						4,3	4,3	Max/ TLK
Realisasi						4,78	4,78	
Capaian						111,16%	111,16%	

- ✓ Akar masalah
 - Kesulitan penyampaian kuisisioner terkait layanan kepada stakeholder yang dituju
- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan
 - Sosialisasi kepada stakeholder terkait layanan unggulan KPKNL Purwokerto
 - Menyediakan sarana kepada masyarakat menyampaikan umpan balik/"feedback" atas layanan yg diterima
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi
 - Menyediakan sarana yg memadai kepada masyarakat menyampaikan umpan balik/"feedback" atas layanan yg diterima

Evaluasi Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL Tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2017	2018	2019	2020	2021	Pol/ K P
Target	4,22	4,22	4,25	4,27	4,3	Max/TLK
Realisasi	4,63 (109,72%)	4,61 (109,24%)	4,39 (103,29%)	4,67 (109,24%)	4,78 (111,16%)	
Capaian	120%	109,24%	103,29%	109,37%	111,16%	



4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

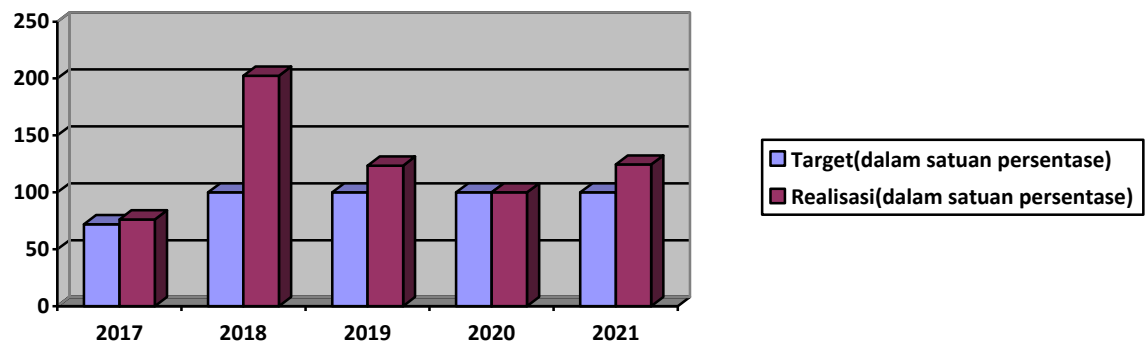
KPKNL Purwokerto	SS: 4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							Pol/ K P
	IKU: 4a-CP "Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan"							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	
Target	-	20%	20%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi		2,17%	2,17%	124,4%	124,4%	124,40%	124,40%	
Capaian		10,87%	10,87%	120%	120%	120%	120%	

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan:
 - Target persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan sampai dengan Desember 2021 tercapai 515 bidang tanah dari target 414 bidang tanah (124,40%), dengan rincian progress =
 - P0 = 0 P3 = 25
 - P1 = 0 P4 = 515
 - P2 = 0

- ✓ Akar Masalah :
 - Perbedaan persepsi kelengkapan dokumen antara Satker dan Kantor Pertanahan
 - Ketersediaan petugas Satker dalam pendampingan pengukuran
 - Adanya target yg harus dicarikan target pengganti karena objek bersinggungan dengan pencatatan pihak lain
- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
 - Rapat koordinasi antara kantor Pertanahan, Satker dan DJKN untuk mencapai kesepakatan mendasar terhadap kendala-kendala yang dihadapi.
 - Monitoring proses sertifikasi BMN
 - Asistensi kepada satker
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :
 - Rapat koordinasi antara kantor Pertanahan, Satker dan DJKN untuk mencapai kesepakatan mendasar terhadap kendala-kendala yang dihadapi
 - Monitoring proses sertifikasi BMN
 - Asistensi kepada satker

Evaluasi Capaian Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan Tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2017	2018	2019	2020	2021	Po/ K P
Target	72%	100%	100%	100%	100%	Max/
Realisasi	76,24%	202,50%	123,53%	100%	124,40%	TLK
Capaian	105,89%	120,00%	120,00%	100,00%	120,00%	



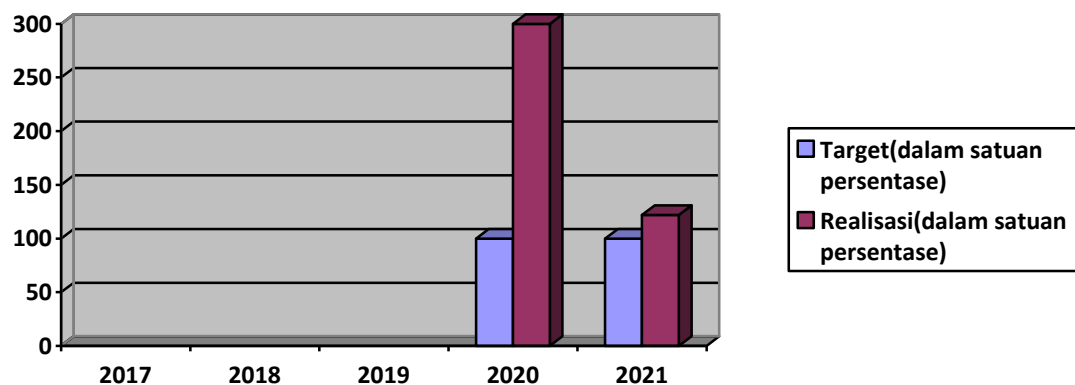
KPKNL Purwokerto	SS: 4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
	IKU: 4b-CP "Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)"							
T/R	Q1	Q4	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	15%	45%	45%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	18,52%	55,56%	55,56%	96,3%	96,3%	122%	122%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Catatan : IKU tersebut baru ditetapkan menjadi target mulai tahun 2020

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) :
 - Target implementasi evaluasi kinerja BMN(portofolio aset) s.d Desember 2021 telah tercapai dengan realisasi sebesar 33 NUP dari target sebanyak 27 NUP, yaitu :
 1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap = 3 NUP
 2. Polres Banjarnegara = 1 NUP
 3. Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap = 3 NUP
 4. Polres Purbalingga = 1 NUP
 5. KPP Pratama Cilacap = 2 NUP
 6. Kejaksaan Negeri Purbalingga = 2 NUP
 7. Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung = 1 NUP
 8. Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo = 2 NUP
 9. Kantor Pertanahan Kab. Banyumas = 1 NUP
 - 10.IAIN = 14 NUP
 - 11.BRSPKN Satria Baturraden = 1 NUP
 - 12.LPP RRI Purwokerto = 2 NUP
- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
 - Koordinasi dengan satker target BMN yang dijadikan objek pengukuran portofolio
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :
 - Koordinasi dengan satker target BMN yang dijadikan objek pengukuran portofolio

Evaluasi Capaian Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) Tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2017	2018	2019	2020	2021	Po/ K P
Target				100%	100%	Max/
Realisasi				300%	122%	TLK
Capaian				120,00%	120,00%	



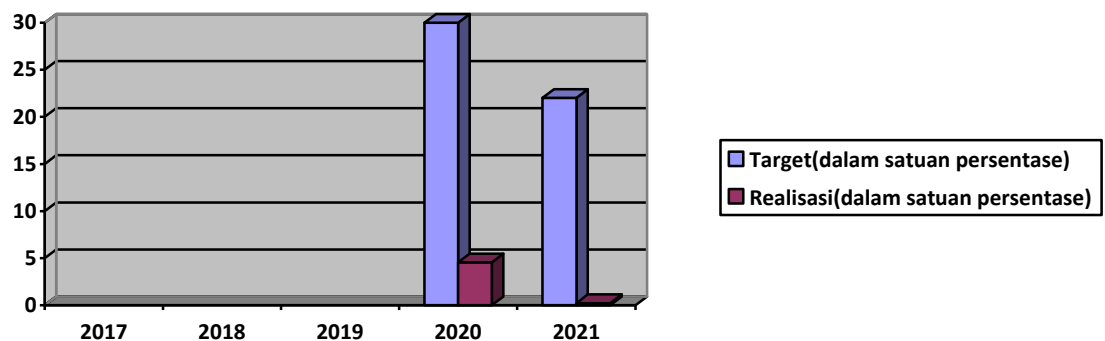
KPKNL Purwokerto	SS: 4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
	IKU: 4c-CP "Deviasi ketergunaan hasil penilaian"							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	Min/ AVG
Realisasi	0,12%	0,33%	0,33%	0,26%	0,26%	0,23%	0,23%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Catatan : IKU tersebut baru ditetapkan menjadi target pada tahun 2020

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait Deviasi ketergunaan hasil penilaian:
 - Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian KPKNL Purwokerto s.d Triwulan IV Tahun 2021 adalah sebesar 0,23 %

Evaluasi Capaian Deviasi ketergunaan hasil penilaian Tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2017	2018	2019	2020	2021	Po/ K P
Target				30%	22%	Max/Sum
Realisasi				4,56%	0,23%	
Capaian				120%	120%	



5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

KPKNL Purwokerto	SS: 5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							Pol/ K P
	IKU: 5a-CP "Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN"							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	2,55%	52,97%	52,97%	88,79%	88,79%	106,96%	106,96%	
Capaian	10,19%	105,94%	105,94%	118,39%	118,39%	106,96%	106,96%	

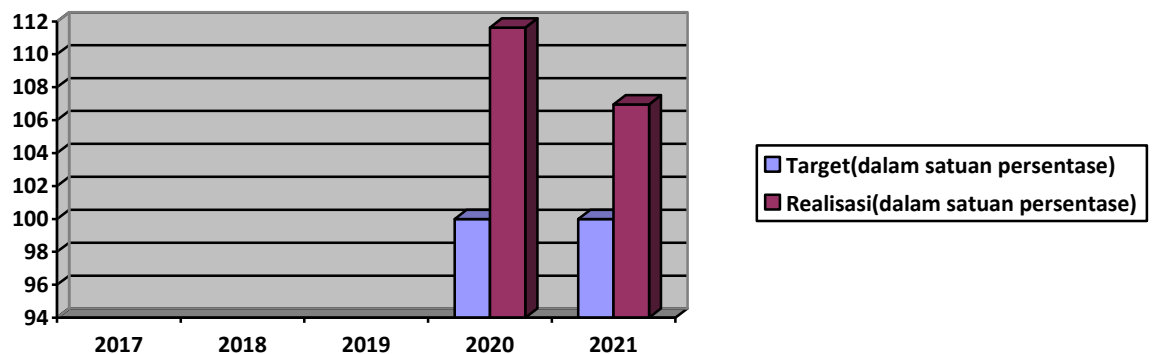
Catatan : IKU tersebut baru ditetapkan menjadi target mulai tahun 2020

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN :
 - Target Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN KPKNL Purwokerto Tahun 2021 sebanyak 589 BKPN.
 - Realisasi Capaian s.d Desember Tahun 2021 adalah sebanyak 630 BKPN (106,96%)

- ✓ Akar Masalah :
 - Masih banyak outstanding BKPN lama
 - Banyaknya BKPN yg tidak didukung Barang jaminan
- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
 - Melakukan koordinasi dengan satker terkait penyelesaian BKPN
 - Percepatan Penyelesaian Piutang Negara melalui Crash Program
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :
 - Intensifikasi pengurusan piutang negara

Evaluasi Capaian Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN Tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2017	2018	2019	2020	2021	Po/ K P
Target				100%	100%	Max/Sum
Realisasi				111,63%	106,96%	
Capaian				111,63%	106,96%	



KPKNL Purwokerto	SS: 5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	IKU: 5b-CP "Persentase produktivitas lelang"							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ KP
Target	15%	20%	20%	25%	25%	35%	35%	Max/TLK
Realisasi	22,12%	25,88%	25,88%	29,64%	29,64%	39,67%	39,67%	
Capaian	120%	120%	120%	118,56%	118,56%	113,34%	113,34%	

Catatan : IKU tersebut baru ditetapkan menjadi target mulai tahun 2018

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait Persentase produktivitas lelang :
 - Realisasi jumlah frekuensi lelang yang laku sampai dengan Desember tahun 2021 sebanyak 430 frekuensi dari 1084 frekuensi lelang.

Isu Utama :

Persentase lelang TAP menurun disanding Q3 sebesar 654 (60,33%) dari 1084 frekuensi lelang.

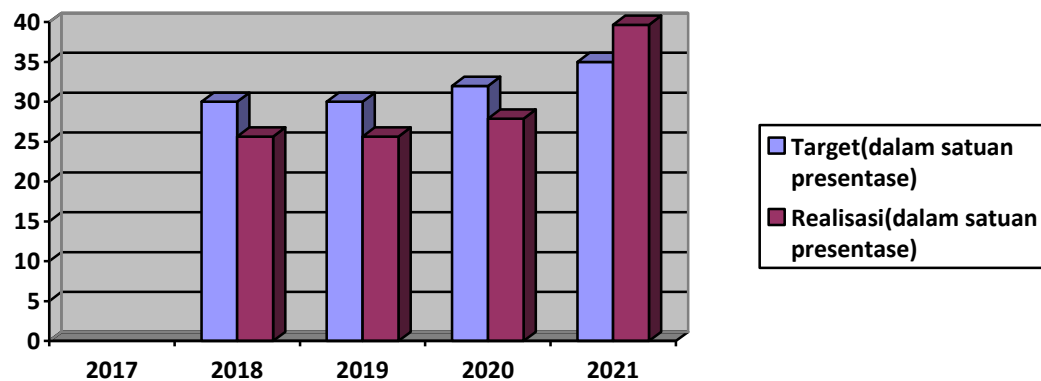
Implikasi :

Target produktivitas lelang tercapai

- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
 - Mengadakan Sosialisasi Lelang Ps. 6 UUHT sesuai PMK No. 213/PMK.06/2020 kepada Pihak Perbankan dan Lembaga Keuangan di Wilayah Kerja KPKNL Purwokerto pada tanggal 22 Maret 2021.
 - Melaksanakan Sosialisasi Permohonan lelang online dan ketentuan lelang kepada satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Purwokerto pada tanggal 25 Agustus 2021.
 - Melaksanakan rapat koordinasi dengan perbankan di wilayah kerja KPKNL Purwokerto secara daring pada tanggal 15 September 2021 dalam upaya pencapaian target organisasi terutama produktivitas lelang melalui permohonan sukarela khususnya lelang UMKM dari Perbankan.
 - Melaksanakan penggalan potensi lelang sukarela

Evaluasi Capaian Persentase produktivitas lelang Tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2017	2018	2019	2020	2021	Pol/ K P
Target	-	30%	32%	34%	35%	Max/Sum
Realisasi	-	25,66%	27,90%	36,37%	39,67%	
Capaian		85,55	87,17	106,98	113,34	



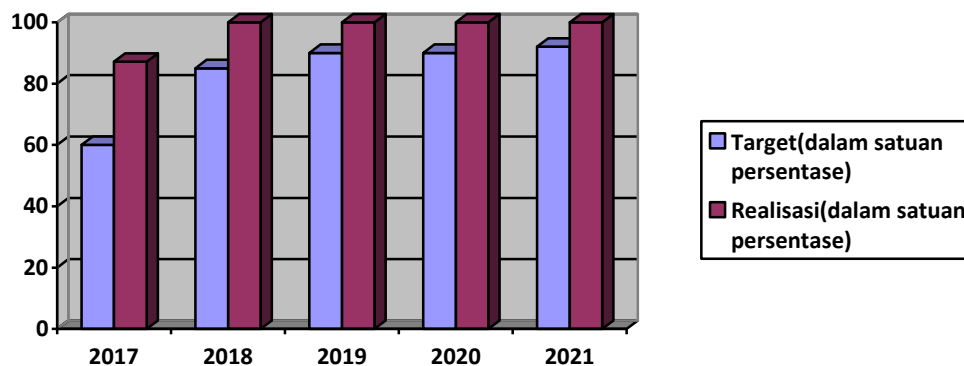
KPKNL Purwokerto	SS: 5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							Pol/ K P
	IKU: 5c-CP"Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction"							
T/R	Q1	Q4	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	
Target	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	Max/AVG
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction :
 - Target presentase Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction tahun 2021 sebesar 92% dari jumlah frekuensi lelang telah dilaksanakan selama setahun.
 - KPKNL Purwokerto telah melaksanakan semua lelang secara e-auction (100%) selama januari s.d Desember 2021

- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
 - Melaksanakan lelang secara e-auction

Evaluasi Capaian Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* Tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini:

T/R	2017	2018	2019	2020	2021	Pol/ K P
Target	60%	85%	90%	90%	92%	Max/TL K
Realisasi	87,12% (145,20%)	100% (117,65%)	100% (111,11%)	100% (111,11%)	100% (108,70%)	
Capaian	120%	117,65%	111,11%	111,11%	108,70%	



KPKNL Purwokerto	SS: 5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							Pol/ K P
	IKU: 5d-CP "Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN"							
T/R	Q1	Q4	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-17	
Target	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	Min/ AVG
Realisasi	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Catatan : IKU tersebut baru ditetapkan menjadi target mulai tahun 2021

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN :
 - Target IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN tahun 2021 adalah sebesar 12,5% yang merupakan rata-rata dari :
 1. Deviasi Data PNBP Lelang = 10%
 2. Deviasi Data PNBP Piutang Negara = 15%

- Realisasi Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN tahun 2021 s.d september 2021 adalah sebesar 0,01 % dengan rincian capaian :
 1. Deviasi Data PNBPN Lelang = 0,01%
 2. Deviasi Data PNBPN Piutang Negara = 0,00%
- ✓ Akar Masalah :
 - Perbedaan data antara modul Pegadaian dengan Simponi
- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
 - Telah dilaksanakan rapat rekonsiliasi dengan Pegadaian terkait perbedaan data
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :
 - Mengadakan rekonsiliasi dengan pihak terkait

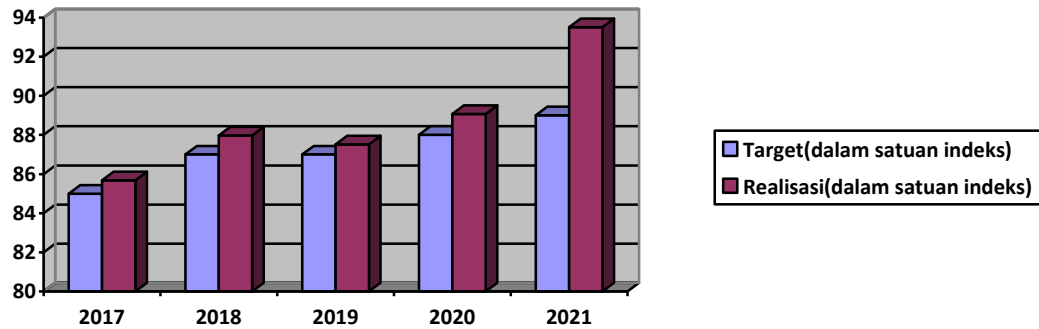
6. Edukasi yang efektif

KPKNL Purwokerto	SS: 6. Edukasi yang efektif							
	IKU: 6a-N "Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi"							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	-	89	89	-	89	89	89	Max/Avg
Realisasi		93,32	93,32		93,32	93,51	93,51	
Capaian		103,73%	103,73%		103,73%	105,07%	105,07%	

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait Tingkat Efektivitas edukasi dan komunikasi :
Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada Semester I 2021 sebesar 93,32 dengan rincian :
 1. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Lelang = 91,59
 2. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi PKN = 93,04

Evaluasi Capaian Tingkat Efektivitas edukasi dan komunikasi Tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2017	2018	2019	2020	2021	Pol/ K P
Target	85	87	87	88	89	Max/Sum
Realisasi	85,68	87,97	87,51	89,07	93,51	
Capaian	100,80%	100,09%	100,58%	101,21%	105,07%	



7. Pengawasan dan Pengendalian yang efektif

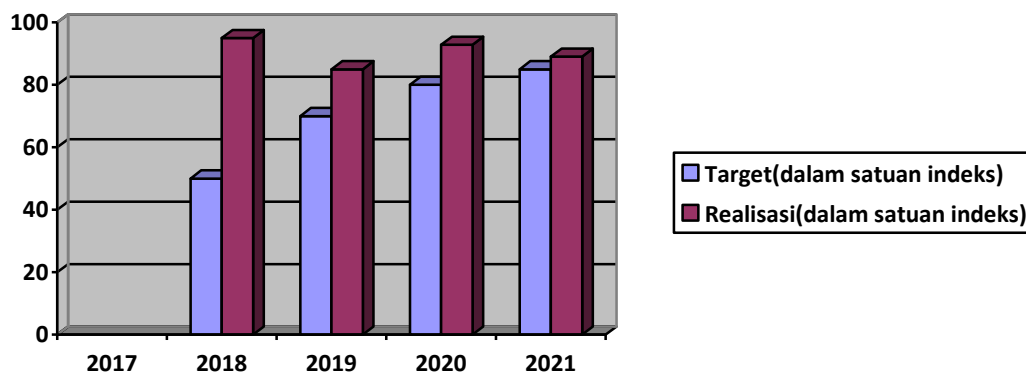
KPKNL Purwokerto	SS: 7. Pengawasan dan Pengendalian yang efektif							
	IKU: 7a-CP "Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara"							
T/R	Q1	Q4	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	-	40%	40%	-	40%	85%	85%	Max/TLK
Realisasi		70,79%	70,79%		82,42%	89,01%	89,01%	
Capaian		120%	120%		120%	104,72%	104,72%	

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara :
 - d. Realisasi Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara s.d Desember 2021 sebesar 89,01%
- ✓ Akar Masalah :
 - e. Penjualan secara lelang tidak laku (TAP)
 - f. Terkait sewa, calon penyewa membatalkan rencana sewa BMN yang telah diajukan.
- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
 - g. Sosialisasi/edukasi kepada satker terkait proses pengelolaan kekayaan negara terutama profiling calon penyewa.
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :
 - h. Sosialisasi/edukasi kepada satker terkait proses pengelolaan kekayaan negara terutama profiling calon penyewa.

Evaluasi Capaian Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan Negara Tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2017	2018	2019	2020	2021	Po/ K P
Target	-	50%	70%	80%	85%	Max/Sum
Realisasi	-	95%	85%	92,86%	89,01%	
Capaian		120%	120%	116,07%	104,72%	

Catatan : IKU tersebut baru ditetapkan menjadi target pada tahun 2018



8. SDM yang kompeten

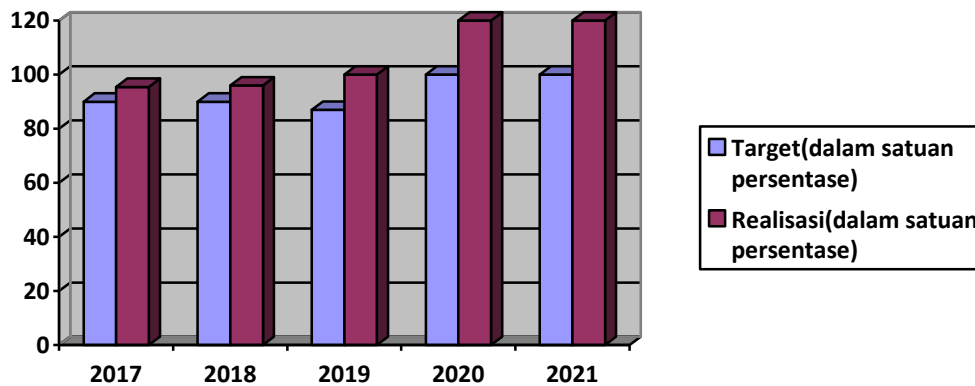
KPKNL Purwokerto	SS: 8. SDM yang kompeten							
	IKU: 8a-N "Persentase pengembangan kompetensi pegawai"							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Po/ K P
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	16,67%	47,44%	47,44%	114,55%	114,55%	120%	120%	
Capaian	111,11%	118,60%	118,60%	120%	120%	120%	120%	

✓ Isu utama dan implikasi terkait pengembangan kompetensi pegawai :

- Realisasi Persentase pengembangan kompetensi pegawai KPKNL Purwokerto s.d. Desember Tahun 2021 sebesar 120% dengan rincian sebagai berikut :
 1. Capaian Utama sebesar : 100%, dimana 45 pegawai telah memenuhi kriteria (jumlah seluruh pegawai sebanyak 45 orang)
 2. Capaian tambahan sebesar : 100%, dimana 45 pegawai telah melebihi kriteria (jumlah seluruh pegawai sebanyak 45 orang)

Evaluasi Capaian Persentase Pengembangan kompetensi pegawai Tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2017	2018	2019	2020	2021	Pol/ K P
Target	90%	90%	87%	100%	100%	Max/Sum
Realisasi	95,45%	96%	100%	120%	120%	
Capaian	106,06%	106,67%	114,94%	120,00%	120,00%	



9. Organisasi yang *fit-for-purpose*

KPKNL Purwokerto	SS: 9. Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>							Pol/ K P
	IKU: 9a-N "Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM"							
T/R	Q1	Q4	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	
Target	-	-	-	-	-	85	85	Max/TLK
Realisasi						97,31	97,31	
Capaian						114,48%	114,48%	

Catatan : IKU tersebut ditetapkan menjadi target pada tahun 2021

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM :
 - Target nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM ada di Triwulan IV 2021.
 - Hasil Penilaian WBBM tahun 2021 oleh Tim Penilai Eselon I (TPE 1) DJKN = 97,36
 - Hasil Penilaian WBBM tahun 2021 pada KPKNL Purwokerto oleh Tim Penilai Kementerian Keuangan = 97,31

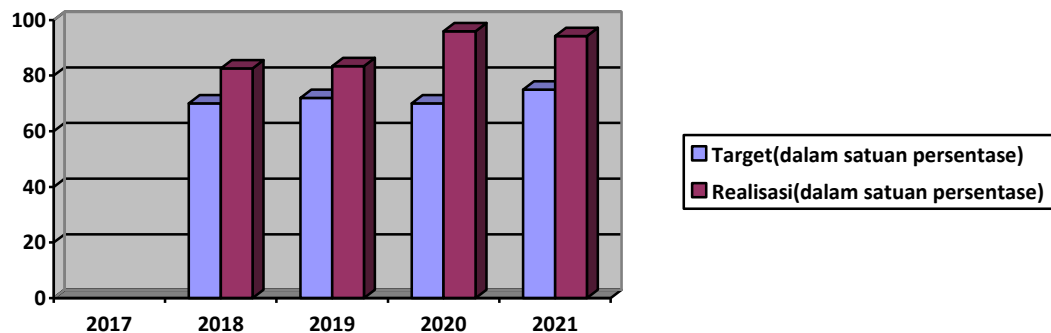
KPKNL Purwokerto	SS: 9. Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>							
	IKU: 9b-N "Nilai reuiu pengelolaan kinerja"							
T/R	Q1	Q4	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	-	-	-	-	-	75	75	Max/TLK
Realisasi						94,25	94,25	
Capaian						120%	120%	

Catatan : IKU tersebut ditetapkan menjadi target pada tahun 2018

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait Review Pengelolaan Kinerja :
 - Target nilai reuiu pengelolaan kinerja ada di Triwulan IV 2021.
 - KPKNL Purwokerto mendapatkan nilai 94,25 untuk review pengelolaan kinerja yang dilakukan oleh Kanwil Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta

Evaluasi Nilai Review Pengelolaan Kinerja Tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2017	2018	2019	2020	2021	Pol/ K P
Target	-	70	72	70	75	Max/Sum
Realisasi	-	82,63	83,38	95,96	94,25	
Capaian		118,04%	115,81%	120%	120%	



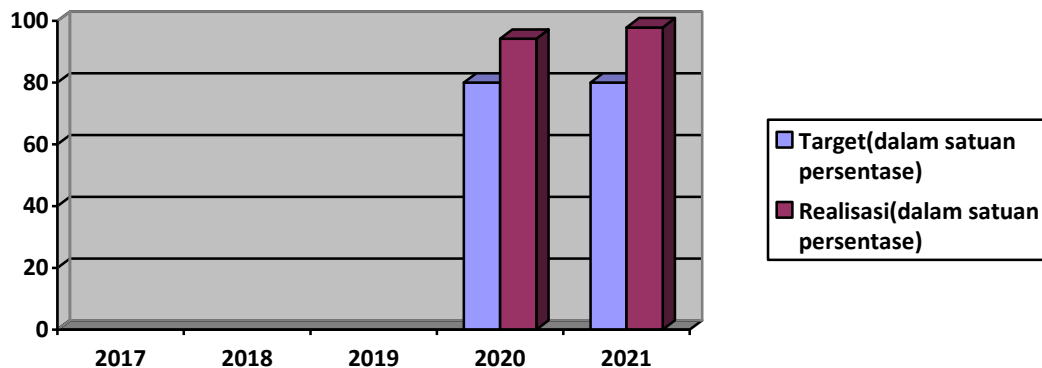
KPKNL Purwokerto	SS: 9. Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>							
	IKU: 9c-N "Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator"							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/AVG
Realisasi	97,90	96,5	97,20	97,20	97,20	97,83	97,83	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Catatan : IKU tersebut ditetapkan menjadi target pada tahun 2020

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator :
 - Nilai Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator Triwulan I tahun 2021 = 97,90
 - Nilai Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator Triwulan II tahun 2021 = 96,5

Evaluasi Capaian efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2017	2018	2019	2020	2021	Pol/ K P
Target	-	-	-	80	80	Max/Sum
Realisasi	-	-	-	94,2	97,83	
Capaian				120%	120%	



10. Pengelolaan keuangan yang optimal

KPKNL Purwokerto	SS: 10. Pengelolaan keuangan yang optimal							Pol/ K P
	IKU: 10a-CP "Persentase kualitas pelaksanaan anggaran"							
T/R	Q1	Q4	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	Max/ TLK
Realisasi	100%	99,71%	99,71%	99,6%	99,6%	95,99%	95,99%	
Capaian	104,71%	104,41%	104,41%	104,29%	104,29%	100,51%	100,51%	

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait Persentase kualitas pelaksanaan anggaran :
 - Target IKU persentase kualitas anggaran s.d. Desember tahun 2021 telah tercapai sebesar 95,99%

Isu Utama :

- refocusing anggaran
- Perubahan kebijakan terkait penyerapan anggaran

Implikasi :

- Kurang efisien

✓ Akar Masalah :

- Formulasi penghitungan IKU-PKPA selalu berubah

✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :

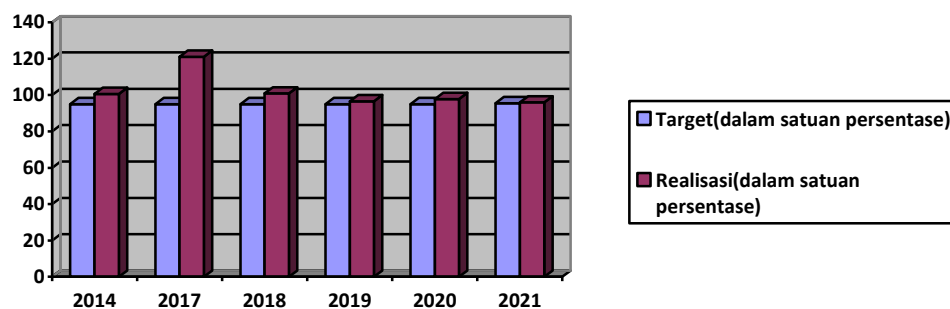
- Koordinasi dengan seksi terkait dalam penggunaan DIPA (sisa anggaran) yang ada untuk mencapai tingkat efisiensi yang diharapkan bisa optimal

✓ Rekomendasi Rencana Aksi :

- Koordinasi dengan kantor pusat dan mitigasi nilai IKU-PKPA agar mencapai nilai yang diharapkan

Evaluasi Capaian Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2017	2018	2019	2020	2021	Po/ K P
Target	95%	95%	95%	95%	95,5%	Max/
Realisasi	121%	100,92%	96,59%	97,80%	95,99%	TLK
Capaian	120%	106,23%	101,67%	108,95%	100,51%	



C. REALISASI ANGGARAN

Selama Tahun Anggaran 2021 seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari DIPA tahun 2021. Dana yang dianggarkan dalam DIPA KPKNL Purwokerto Tahun Anggaran 2021 nomor SP DIPA-015.09.2.537770/2021 tanggal 23 November 2020 adalah sebesar 1.471.930.000,00. Dilakukan revisi DIPA sebanyak 8 (delapan) kali dan merubah dana yang dianggarkan. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp1.422.387.273,00 Atau dengan persentase realisasi atas anggaran sebesar 96,63%.

Adapun realisasi anggaran sebesar 96,63% tersebut, rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Belanja Modal

Dana yang dianggarkan untuk belanja modal pada tahun 2021 adalah sebesar Rp6.810.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.618.000,00 atau sebesar 97,18%.

2. Belanja Barang

Dana yang dianggarkan untuk belanja barang pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1.465.120.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.415.769.273,00 atau sebesar 96,63%.

Pada tahun 2021 anggaran belanja pegawai sudah terpusat pada DIPA Eselon I, sehingga unit vertikal tidak memperoleh pagu belanja pegawai.

Terdapat perbedaan persentase realisasi anggaran menurut Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi capaian IKU, dimana berdasarkan laporan realisasi anggaran, penyerapan sebesar 96,63% (di luar belanja pegawai) sedangkan menurut realisasi capaian IKU sebesar 100,51%. Hal ini terjadi karena pada realisasi capaian IKU selain memperhitungkan penyerapan anggaran juga memperhitungkan pencapaian keluaran riil, nilai efisiensi, dan pencapaian konsistensi, dimana dalam memperhitungkan capaian IKU tersebut terdapat formula penghitungannya sendiri dan masing-masing realisasi penyerapan anggaran, realisasi pencapaian keluaran riil, realisasi efisiensi dan realisasi konsistensi memiliki pembobotan tersendiri dalam formula penghitungannya.

BAB IV P E N U T U P

A. SIMPULAN

Secara umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto telah melaksanakan kinerja selama periode Tahun Anggaran 2021 dengan sangat baik. Seluruh target atas 10 Sasaran Strategis dengan total 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Kontrak Kinerja *Kemenkeu Three* KPKNL Purwokerto Tahun 2021 dapat tercapai dengan sempurna, bahkan melebihi target. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang berasal dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada awal tahun anggaran tercapai sebesar 114,08% dari nilai maksimal 120%.

Sebuah prestasi yang layak dipertahankan dan bila perlu ditingkatkan lagi. Hal ini perlu agar dapat menunjukkan konsistensi KPKNL Purwokerto dalam peningkatan kinerja dan dalam melakukan berbagai perbaikan menuju kesempurnaan.

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, tentu tidak lepas dari faktor-faktor pendukung, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kerja sama dari satuan kerja yang mulai menyadari tentang arti penting pengelolaan Aset Negara;
2. Dukungan antar seksi yang memadai dalam pelaksanaan penilaian BMN;
3. Motivasi tinggi yang dimiliki pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
4. Hubungan yang telah terjalin dengan para *stakeholder*;
5. Animo masyarakat untuk membeli barang melalui lelang semakin tinggi;
6. Citra lelang di masyarakat yang mulai baik dan didukung oleh diterapkannya *e-auction*;
7. Dukungan dari Penyerah Piutang yang tinggi dalam hal penyelesaian Pengurusan Piutang Negara;
8. Respon yang tinggi dari Penyerah Piutang dalam proses rekonsiliasi data piutang;
9. Perencanaan yang tepat dalam pengalokasian anggaran belanja;
10. Pemberian dukungan yang maksimal dan terpadu terhadap seluruh pegawai;

Walau demikian, tidak semua yang dihadapi KPKNL Purwokerto dapat berjalan dengan mudah. Pencapaian pelaksanaan kegiatan KPKNL Purwokerto pada tahun 2021

ternyata masih terdapat perolehan nilai capaian indikator kinerja utama yang belum memuaskan dan juga masih adanya beberapa permasalahan yang menonjol yang merupakan hambatan pada tahun 2021. Maka dari itu, untuk memperbaiki kinerja pada masa yang akan datang perlu dirumuskan strategi pemecahan masalah dimaksud sebagaimana telah diuraikan dalam komentar (ringkasan eksekutif) di atas. Dalam perjalanannya KPKNL Purwokerto menemukan beberapa kesulitan dan kendala ketika melaksanakan tugas. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses sertifikasi BMN, satker tidak mudah dalam melengkapi persyaratan seperti surat pelepasan hak dan tanda tangan dari para ahli waris karena pemilik asal sudah meninggal dunia serta perlu waktu lama dalam proses pengajuan sertifikasi ke kantor pertanahan karena kelengkapan dokumen dan pengukuran bidang tanahnya;
2. Penyampaian dokumen permohonan oleh *stakeholder* yang tidak lengkap sehingga menghambat layanan unggulan;
3. Belum ada aturan tegas mengenai sanksi terhadap satker-satker yang belum/tidak melakukan pelaporan;
4. Penyerahan BKPN dari Kantor Pusat tidak dilengkapi dengan dokumen yang memadai yang memiliki kekuatan hukum;
5. Rendahnya kesadaran debitur dalam penyelesaian piutangnya;
6. Banyak BKPN yang tidak memiliki barang jaminan;
7. Tidak adanya jaminan perlindungan kepada pelaksana eksekusi;
8. Banyaknya permohonan lelang yang belum lengkap saat diajukan;
9. Banyaknya lelang TAP;
10. Banyaknya lelang yang dibatalkan oleh pemohon lelang karena pelunasan oleh debitur;
11. Masih rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti lelang;
12. Menurunnya daya beli masyarakat karena situasi politik, lokasi yang tidak *marketable*, lelang HT yang masih terkendala pengosongan, kondisi pandemi *covid-19*;
13. Wilayah kerja KPKNL Purwokerto yang cukup luas yang meliputi 7 kabupaten menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas.

B. SARAN

Saran secara umum untuk kinerja KPKNL Purwokerto adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja bagi pejabat dan pegawai di KPKNL Purwokerto agar *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Dalam pemenuhan target capaian, saat ini KPKNL Purwokerto lebih fokus untuk menetapkan dan menerapkan strategi-strategi baru.

Adapun saran agar semakin dapat meningkatkan kinerja KPKNL Purwokerto adalah dengan menetapkan strategi yang dapat diimplementasikan melalui kerja keras dan kerja sama secara terpadu dari seluruh pegawai KPKNL, antara lain melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu layanan menuju pelayanan prima, dan profesional kepada *stakeholder* dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan utilisasi Kekayaan Negara;
2. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, mengutilisasi Kekayaan Negara dan melakukan sertifikasi BMN;
3. Terus melakukan pembinaan dan bimbingan teknis mengenai penatausahaan dan pengelolaan BMN;
4. Melakukan program pendataan, verifikasi dan sertifikasi aset BMN berupa tanah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional;
5. Meningkatkan penggalian potensi lelang dan sosialisasi lelang *e-auction*;
6. Mengadakan Sosialisasi Lelang Pasal 6 UUHT sesuai PMK No. 213/PMK.06/2020 kepada kepada Pihak Perbankan dan Lembaga Keuangan di Wilayah Kerja KPKNL Purwokerto dan sosialisasi lelang *e-auction*;
7. Optimalisasi penggunaan aplikasi TIK dalam mendukung tugas dan fungsi diantaranya *e-auction* (Pelayanan Lelang) dan SIMAN (Pengelolaan Kekayaan Negara),
8. Menyenggarakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada *stakeholder* dalam rangka peningkatan pemahaman atas peraturan terkait seluruh tugas dan fungsi KPKNL;
9. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Wilayah, Kantor Pusat dan unit kerja eksternal baik instansi vertikal maupun Pemerintah Daerah;

10. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terkait pengelolaan manajemen kinerja dan penerapan mitigasi risiko serta kepatuhan internal;
11. Mengoptimalkan kinerja pegawai melalui kegiatan yang bersifat lintas unit;
12. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan menugaskan para pegawai untuk mengikuti berbagai diklat agar menjadi pegawai multi talenta;
13. Pelaksanaan *capacity building* internal pegawai KPKNL Purwokerto secara berkala;
14. Memberikan motivasi kepada para pegawai sehingga tercipta suasana kerja harmonis dan bersemangat untuk melebihi capaian target;
15. Melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan, penerapan budaya kerja untuk mendukung Transformasi Kelembagaan;
16. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, utilisasi kekayaan Negara dan sertifikasi BMN;
17. Melaksanakan kegiatan SEMBARI “Semangat Menyambut Mentari” yaitu program sapa pagi dari Kepala KPKNL Purwokerto untuk memastikan semua pegawai dalam keadaan sehat dan *me-riveuw* agenda pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan;
18. Melaksanakan program BLAKASUTA “Blak – Blakan Suka Cerita” yaitu program sharing informasi terkait tugas dan peraturan terbaru dari masing - masing Seksi dan Fungsional, sehingga seluruh pegawai dapat memahami tugas dan fungsi KPKNL Purwokerto dengan baik

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto tahun anggaran 2021 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja khususnya Laporan Kinerja KPKNL Purwokerto Tahun Anggaran 2021 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Pimpinan Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta dan Kantor Pusat DJKN maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing yang pada akhirnya dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pula pada masa yang akan datang serta sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan di tahun-tahun berikutnya.



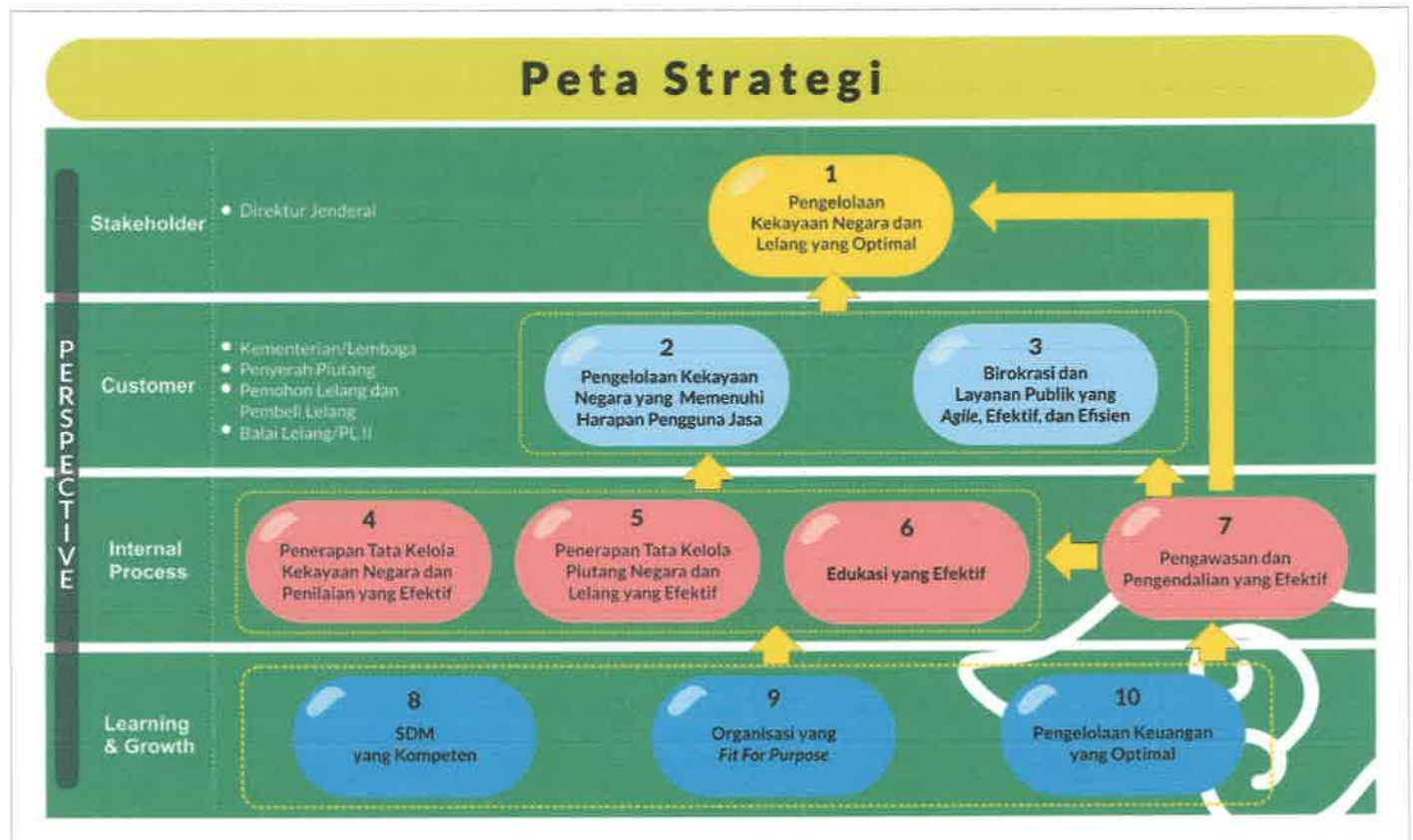
**KONTRAK KINERJA
NOMOR 12/KN.21/2021**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH DAN D. I. YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH DAN D. I. YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%
		1c-CP Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88
		2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,3
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%
		4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		4c-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%
		5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		5d-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%
6.	Edukasi yang Efektif	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	89
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
8.	SDM yang Kompeten	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9.	Organisasi yang Fit For Purpose	9a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	85
		9b-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75
		9c-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

Program/Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp. 212.976.000,00
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp. 10.540.000,00
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp. 22.236.000,00
3. Pengelolaan Aset	Rp. 180.200.000,00
4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	-
5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	-
6. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	-
Dukungan Manajemen	Rp. 1.466.994.000,00
1. Legislasi dan Litigasi	Rp. 71.066.000,00
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp. 1.380.216.000,00
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp. 5.352.000,00
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM	-
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp. 10.360.000,00
6. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	-

Semarang, 29 Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah DJKN
Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta,



Mahmudsyah

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Purwokerto,



Soeparjanto

RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH DAN D. I. YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2021

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	62%	62%
1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1c-CP	Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88	88	88	88	88	88	88
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i>, Efektif, dan Efisien							
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,3	4,3
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
4a-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	-	20%	20%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	15%	45%	45%	75%	75%	100%	100%
4c-CP	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	15%	20%	20%	25%	25%	35%	35%
5c-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
6	Edukasi yang Efektif							
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	89	89	-	89	89	89
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
8	SDM yang Kompeten							
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
9	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>							
9a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju	-	-	-	-	-	85	85

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
	WBBM							
9b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	75	75
9c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	80	80	80	80	80	80
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%

Semarang, 29 Januari 2021

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Purwokerto,



Soeparjanto

Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Mahmudsyah	1	Nama	Soeparjanto
2	NIP	19640716 199103 1 001	2	NIP	19700429 199603 1 001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Madya/ IV.d	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Tingkat I/ IV.b
4	Jabatan	Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	4	Jabatan	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto
5	Unit Kerja	Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	5	Unit Kerja	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	ANGKA KREDIT	TARGET			
			KUANTITAS / OUTPUT	KUALITAS / MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Meningkatkan Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	62%	100	12 bulan	-
2	Meningkatkan Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	-	100%	100	12 bulan	-
3	Menurunkan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	-	100%	100	12 bulan	-
4	Mewujudkan Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	-	88	100	12 bulan	-
5	Meningkatkan Realisasi Pokok Lelang	-	100%	100	12 bulan	-
6	Mewujudkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	4,3	100	12 bulan	-
7	Mensertifikasi Bidang tanah BMN	-	100%	100	12 bulan	-
8	Mengimplementasikan Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	100%	100	12 bulan	-
9	Meningkatkan Ketergunaan hasil Penilaian	-	78%	100	12 bulan	-
10	Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian BKPN	-	100%	100	12 bulan	-
11	Meningkatkan Produktivitas Lelang	-	35%	100	12 bulan	-
12	Melaksanakan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	-	92%	100	12 bulan	-
13	Meningkatkan Akurasi Data PNBP Fungsional DJKN	-	87,5%	100	12 bulan	-
14	Meningkatkan efektivitas edukasi dan komunikasi	-	89	100	12 bulan	-
15	Menindaklanjuti persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	85%	100	12 bulan	-
16	Mengembangkan kompetensi pegawai	-	100%	100	12 bulan	-
17	Mewujudkan Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	-	85	100	12 bulan	-
18	Mewujudkan Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	75	100	12 bulan	-
19	Melaksanakan FGD Pejabat Administrator	-	80	100	12 bulan	-
20	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan anggaran	-	95,5%	100	12 bulan	(Rp 1,67 M)

Semarang, 29 Januari 2021

Pejabat Penilai,



Mahmudsyah
NIP 19640716 199103 1 001

PNS yang Dinilai,



Soeparjanto
NIP 19700429 199603 1 001

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH DAN D. I. YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
1	SS: Pengelolaan kekayaan negara yang optimal IKU: Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Optimalisasi BMN	1. Meningkatkan pengelolaan BMN yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi terhadap masyarakat 2. BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi <i>underutilized/ idle</i> yang tidak sedang dimanfaatkan diajukan pemanfaatannya	12 Bulan	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	Rp. 7.272.000,00

Semarang, 29 Januari 2021
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Purwokerto,


Soeparjanto

**LEMBAR PENETAPAN
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Bersama ini ditetapkan manual IKU Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto untuk periode Kontrak Kinerja tahun 2021 yang meliputi:

- a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK;
- b. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP);
- c. Persentase Penurunan Nilai *Outstanding* Piutang Negara;
- d. Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang;
- e. Persentase Realisasi Pokok Lelang;
- f. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL;
- g. Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi;
- h. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset);
- i. Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian;
- j. Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN;
- k. Persentase Produktivitas Lelang;
- l. Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction;
- m. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN;
- n. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi;
- o. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara;
- p. Persentase pengembangan kompetensi pegawai;
- q. Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM;
- r. Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja;
- s. Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator;
- t. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran;

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 08 Februari 2021

Kepala Seksi Kepatuhan Internal,

Kepala KPKNL Purwokerto,



Wirta

NIP 197312251994021001



Soeparjanto

NIP 197004291996031001

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL PURWOKERTO
KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

1a-CP

Perspektif:	<i>Stakeholder</i>				
Sasaran Strategis:	1. Pengelolaan kekayaan negara dan Lelang yang optimal				
Deskripsi Sasaran Strategis:	<p>Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.</p> <p>Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND; 2) pengurusan piutang negara; dan 3) pelayanan lelang. <p>Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle) 2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBP (revenue generating). 3). Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum) 4). Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat. 				
Indikator Kinerja Utama:	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK				
Deskripsi:	<p>Definisi: Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.</p> <p>Formula Pengukuran</p> $\text{Rata-Rata Tertimbang} = \frac{(n1 \times x1) + (n2 \times x2) + (n3 \times x3) + (n4 \times x4)}{(n1 + n2 + n3 + n4)}$ <p>n = jumlah nup per jenis objek per satuan kerja x = rata-rata persentase kesesuaian per jenis objek per satuan kerja</p> <p>Formula Optimalisasi</p> $\text{Rata-Rata Tertimbang} = \frac{(n1 \times x1) + (n2 \times x2) + (n3 \times x3) + (n4 \times x4)}{(n1 + n2 + n3 + n4)}$ <p>n = jumlah nup per jenis objek per satuan kerja x = rata-rata persentase kesesuaian per jenis objek hasil optimalisasi per satuan kerja</p> <p>Bentuk Optimalisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan BMN 2. Pemanfaatan BMN <p>Pembobotan</p> <table border="1"> <tr> <td>Formula Pengukuran</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>Formula Optimalisasi</td> <td>25%</td> </tr> </table> <p>Satker Target: Tanah dan/atau Bangunan/Gedung Kantor dan Tanah dan/atau Rumah Negara/Mess/Asrama/Sejenisnya pada satker untuk seluruh Kanwil DJKN sesuai data terlampir.</p> <p>Tujuan Strategis: Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara</p>	Formula Pengukuran	75%	Formula Optimalisasi	25%
Formula Pengukuran	75%				
Formula Optimalisasi	25%				
Satuan Pengukuran:	Persentase				

Jenis Aspek Target Pada SKP: Kuantitas/ Output Kualitas/Mutu Waktu Biaya

Tingkat Kendali IKU: High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU: Exact Proxy Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU: Kepala KPKNL Purwokerto

Unit/Pihak Penyedia Data: Seksi PKN

Sumber Data: Data Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK dan Optimalisasi Tindak Lanjut Hasil Perhitungan

Jenis Cascading IKU: Cascading Peta Cascading Non Peta Non Cascading

Metode Cascading: Direct Indirect

Jenis Konsolidasi Periode: Sum Average Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi: Sum Average Raw Data

Polarisasi: Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan: Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Konversi 120: Ya Tidak

Tabel Data

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I					-
Triwulan II					50%
Triwulan III					55%
Triwulan IV					62%
Tahunan	N/A	N/A	N/A	N/A	62% (218 NUP)

menunggu konfirmasi ke

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL PURWOKERTO
KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

1b-CP

Perspektif:	Stakeholder
Sasaran Strategis:	1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal
Deskripsi Sasaran Strategis:	<p>Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.</p> <p>Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND; 2) pengurusan piutang negara; dan 3) pelayanan lelang. <p>Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle) 2. Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBPN (revenue generating). 3. Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum) 4. Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.
Indikator Kinerja Utama:	1b-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
Deskripsi:	<p>Definisi:</p> <p>Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara.</p> <p>Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara</p> <p>Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:</p> <p>1). PNBPN BMN Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai <i>cost</i> yang dikeluarkan dan <i>revenue</i> diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara) b. pemanfaatan barang milik negara; dan c. pemindahtanganan barang milik negara. <p>yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.</p> <p>Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara.</p> <p>2). PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN) Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.</p> <p>3). PNBPN Lelang Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian b. bea lelang batal atas permintaan penjual, c. biaya permohonan lelang, d. uang jaminan pembeli wanprestasi, e. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang <p>Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan terkait Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar</p>

Target PNBPN Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Purwokerto Tahun 2021 :

- a. PNBPN BMN = Rp. 4.150.000.000,00
- b. PNBPN PN = Rp. 9.100.000,00
- c. PNBPN Lelang = Rp. 4.286.000.000,00

Formula:

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi PNBPN Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang}}{\text{Target Total PNBPN Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang}} \times 100\%$$

Tujuan Strategis:

Optimalisasi penerimaan dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

Satuan Pengukuran:

Jenis Aspek Target Pada SKP: Kuantitas/Output Kualitas/Mutu Waktu Biaya

Tingkat Kendali IKU: High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU: Exact Proxy Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:

Unit/Pihak Penyedia Data:

Sumber Data:

Jenis Cascading IKU: Cascading Peta Cascading Non Peta Non Cascading

Metode Cascading: Direct Indirect

Jenis Konsolidasi Periode: Sum Average Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi: Sum Average Raw Data

Polarisasi: Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan: Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Konversi 120: Ya Tidak

Tabel Data

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	5%	15%	5%	11%	10%
Triwulan II	30%	23%	30%	27%	30%
Triwulan III	60%	39%	60%	44%	60%
Triwulan IV	100%	147%	100%	84%	100%
Tahunan	100% (Rp 25.417.760.241)	Rp46,770,153,425	100% (Rp 11.493.919.150)	84%(Rp. 9.665.762.915,00)	100% (Rp 8.445.100.000,00)

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL PURWOKERTO
KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

1c-CP

Perspektif :	Stakeholder
Sasaran Strategis :	1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal
Deskripsi Sasaran Strategis :	<p>pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.</p> <p>Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND; 2) pengurusan piutang negara; dan 3) pelayanan lelang. <p>Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle) 2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBPN (revenue generating). 3). Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum) 4). Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.
Indikator Kinerja Utama :	1c-CP Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara
Deskripsi :	<p>Definisi:</p> <p>IKU Tingkat <i>Outstanding</i> Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara diperoleh dari penurunan <i>outstanding</i> piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan <i>outstanding</i> masing-masing KPKNL di wilayahnya.</p> <p>Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk BKPN dengan SP3N s.d 31 Desember 2017, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angsuran 2. Pelunasan 3. Penarikan/ Pengembalian 4. Pelunasan 5. PSBDT 6. Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun 2021. <p>Formula :</p> $\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi Penurunan Nilai Outstanding PN}}{\text{Target Penurunan Nilai Outstanding PN}} \times 100\%$ <p>Tujuan:</p> <p>Percepatan penyelesaian <i>outstanding</i> piutang negara per 31 Desember 2017 yang dikelola tahun 2021</p>
Satuan Pengukuran :	Persentase
Jenis Aspek Target Pada SKP :	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/Output () Kualitas/Mutu () Waktu
Tingkat Kendali IKU :	() High <input checked="" type="checkbox"/> Moderate () Low
Tingkat Validitas IKU :	() Exact <input checked="" type="checkbox"/> Proxy () Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Kepala KPKNL Purwokerto
Unit/Pihak Penyedia Data :	Seksi PN

Sumber Data :

Jenis Cascading IKU : **Cascading Peta** *Cascading Non Pe* *Non Cascading*

Metode Cascading : *Direct* **Indirect**

Jenis Konsolidasi Periode : *Sum* *Average* **Take Last Known Value**

Jenis Konsolidasi Lokasi : *Sum* *Average* **Raw Data**

Polarisasi IKU : **Maximize** *Minimize* *Stabilize*

Periode Pelaporan : *Bulanan* **Triwulanan** *Semesteran* *Tahunan*

Konversi 120 : *Ya* **Tidak**

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2018			2020		2021
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	-	-	-	0,5%	0.19%	25%
Triwulan II	-	-	-	1%	0.19%	50%
Triwulan III	-	-	-	2%	1.25%	75%
Triwulan IV	-	-	-	3%	4.26%	100%
Tahunan	N/A	N/A	N/A	3% (Rp. 299.478.801,18)	4.26% (Rp. 425.387.488,00)	100% (Rp 359.254.343)

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL PURWOKERTO
KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

2a-CP

Perspektif: Customer

Sasaran Strategis: 2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Deskripsi Sasaran Strategis: Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara

Indikator Kinerja Utama: 2a-CP Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara

Definisi:						
Layanan Kekayaan Negara yang diukur:						
Uraian	Indeksasi		Mulai Menghitung	PIC		
1. Persetujuan/ Penolakan Permohonan Sewa BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan (Integrasi Layanan) pada KPKNL			Surat Permohonan Asli diterima dan Dokumen Lengkap	Seksi PKN dan Seksi Pelayanan Penilaian KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan	
a) Jumlah Objek 1-50	100= <10 hari kerja	Sangat tepat waktu				
	90= 10-15 hari kerja					
	80= 16-24 hari kerja					
	70=25 hari kerja					Tepat waktu
	60= 26-32 hari kerja					Tidak tepat waktu
	50 = 33-40 hari kerja					Sangat tidak tepat waktu
40 = > 40 hari kerja						
b) Jumlah Objek 51-100	100= <10 hari kerja	Sangat tepat waktu				
	90= 10-15 hari kerja					
	80= 16-26 hari kerja					
	70=27 hari kerja					Tepat waktu
	60= 28-35 hari kerja					Tidak tepat waktu
	50 = 36-40 hari kerja					Sangat tidak tepat waktu
40 = > 40 hari kerja						
c) Jumlah Objek >100	100= <10 hari kerja	Sangat tepat waktu				
	90= 10-19 hari kerja					
	80= 20-28 hari kerja					
	70=29 hari kerja		Tepat waktu			
	60= 30-40 hari kerja		Tidak tepat waktu			
	50 = 41-50 hari kerja		Sangat tidak tepat waktu			
40 = > 50 hari kerja						
2. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL	100 = 1 s.d. 2 hari kerja	Sangat tepat waktu	Surat Permohonan Asli diterima dan Dokumen Lengkap	Seksi PKN KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan	
	90 = 3 hari kerja					
	80 = 4 hari kerja					
	70 = 5 hari kerja					Tepat waktu
0 = > 5 hari kerja	Tidak tepat waktu					
3. Persetujuan/ Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL	100 = 1 s.d. 2 hari kerja	Sangat tepat waktu	Surat Permohonan Asli diterima dan Dokumen Lengkap	Seksi PKN KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan	
	90 = 3 s.d. 4 hari kerja					
	80 = 5 s.d. 6 hari kerja					
	70 = 7 hari kerja					Tepat waktu
0 = > 7 hari kerja	Tidak tepat waktu					
4. Penetapan Jadwal Lelang	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu	Dokumen Permohonan Lelang telah diterima Lengkap	Seksi Lelang KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan	
	70 = 2 hari kerja (SOP LU)					Tepat waktu
	0 = > 2 hari kerja					Tidak tepat waktu
5. Pelayanan Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu	Dokumen Permohonan telah Lengkap	Seksi HI KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan	
	0 = > 1 hari kerja					Tidak tepat waktu

Deskripsi:

6. Pelayanan Pemberian Kuitansi Pembayaran Harga Lelang	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu	Dokumen Permohonan telah Lengkap	Seksi HI KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
	0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu			
7. Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang dan Dokumen Kepemilikan Barang	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu	Dokumen Permohonan telah Lengkap	Seksi Lelang KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
	0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu			
8. Penyetoran Hasil Bersih Lelang (Kas Negara)	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu		Seksi HI KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
	0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu			
9. Penyetoran Hasil Bersih Lelang (selain Kas Negara)	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu		Seksi HI KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
	80 = 2 hari kerja	Tepat waktu			
	70 = 3 hari kerja	Tidak tepat waktu			
	0 = > 3 hari kerja	Tidak tepat waktu			
10. Pelayanan Permohonan Keringanan Utang pada KPKNL	100 = 1 s.d. 4 hari kerja	Sangat tepat waktu	Persyaratan Dokumen Diterima Lengkap	Seksi PN KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
	90 = 5 s.d. 9 hari kerja	Tepat waktu			
	80 = 10 s.d. 14 hari kerja	Tidak tepat waktu			
	70 = 15 hari kerja	Tidak tepat waktu			
11. Pelayanan Permohonan Penarikan Pengurusan Piutang Negara	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu	Persyaratan Dokumen Diterima Lengkap	Seksi PN KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
	80 = 2 hari kerja	Tepat waktu			
	70 = 3 hari kerja	Tidak tepat waktu			
	0 = > 3 hari kerja	Tidak tepat waktu			
12. Pelayanan Permohonan Penebusan Barang Jaminan Senilai/di Atas Nilai Pengikatan	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu	Persyaratan Dokumen Diterima Lengkap	Seksi PN KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
	90 = 2 hari kerja	Tepat waktu			
	80 = 3 hari kerja	Tidak tepat waktu			
	70 = 4 hari kerja	Tidak tepat waktu			
13. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu	Bukti Kuitansi dan Nota Pembayaran Pelunasan Diterima	Seksi HI KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
	0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu			
14. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu	Bukti Kuitansi dan Nota Pembayaran Pelunasan	Seksi HI KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
	0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu			

Formula:	
Capaian =	$\frac{\sum \text{indeks ketepatan waktu penyelesaian penyelesaian layanan kekayaan negara lingkup KPKNL Purwokerto}}{\sum \text{jumlah permohonan layanan kekayaan negara lingkup KPKNL Purwokerto}}$
Tujuan Strategis:	
Menjaga dan meningkatkan kualitas layanan di lingkungan unit vertikal	

Satuan Pengukuran:	Indeksasi
Jenis Aspek Target pada SKP	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/Output () Kualitas/Mutu () Waktu () Biaya
Tingkat Kendali IKU:	<input checked="" type="checkbox"/> High () Moderate () Low
Tingkat Validitas IKU:	() Exact <input checked="" type="checkbox"/> Proxy () Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:	Kepala KPKNL Purwokerto
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi PKN, Seksi PN, Seksi HI, Seksi Pelayanan Lelang
Sumber Data:	Rekapitulasi monitoring penyelesaian layanan KPKNL
Jenis Cascading IKU:	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta () Cascading () Non-Cascading
Metode Cascading:	() Direct <input checked="" type="checkbox"/> Indirect
Jenis Konsolidasi Periode:	() Sum <input checked="" type="checkbox"/> Average () Take Last Known Value
Jenis Konsolidasi Lokasi:	() Sum () Average <input checked="" type="checkbox"/> Raw data
Polarisasi:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize () Minimize () Stabilize

Periode Pelaporan: Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Konversi 120: Ya Tidak

Tabel Data

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	85	96.63	87	95.79	88
Triwulan II	85	97.75	87	96.82	88
Triwulan III	85	95.95	87	96.19	88
Triwulan IV	85	98.23	87	94.19	88
Tahunan	85	97.14	87	95.75	88

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL PURWOKERTO
KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

2b-CP

Perspektif:

Sasaran Strategis:

Deskripsi Sasaran Strategis:

Indikator Kinerja Utama:

Deskripsi:

Definisi:
Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu. Target jumlah pokok lelang pada KPKNL Purwokerto tahun 2021 adalah sebesar Rp 82.000.000.000,00 dengan rincian target pokok lelang dari PL I/Jafung sebesar Rp. 47.000.000.000,00 dan target pokok lelang pegadaian sebesar Rp. 35.000.000.000,00

Formula:

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi Pokok Lelang KPKNL} + \text{Pegadaian}}{\text{Target Pokok Lelang KPKNL} + \text{Pegadaian}} \times 100\%$$

Tujuan Strategis:
Lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

Satuan Pengukuran:

Jenis Aspek Target Pada SKP: **Kuantitas/Output** **Kualitas/Mutu** **Waktu** **Biaya**

Tingkat Kendali IKU: **High** **Moderate** **Low**

Tingkat Validitas IKU: **Exact** **Proxy** **Activity**

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:

Unit/Pihak Penyedia Data:

Sumber Data:

Jenis Cascading IKU: **Cascading Peta** **Cascading Non Peta** **Non Cascading**

Metode Cascading : **Direct** **Indirect**

Jenis Konsolidasi Periode: **Sum** **Average** **Take Last Known Value**

Jenis Konsolidasi Lokasi: **Sum** **Average** **Raw Data**

Polarisasi: **Maximize** **Minimize** **Stabilize**

Periode Pelaporan: **Bulanan** **Triwulanan** **Semesteran** **Tahunan**

Konversi 120: **Ya** **Tidak**

Tabel Data

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target (%)
Triwulan I	10%	25.22%	10%	16.08%	20%
Triwulan II	30%	35.64%	30%	25.80%	40%
Triwulan III	60%	75.33%	60%	41.97%	70%
Triwulan IV	100%	75.33%	100%	78.08%	100%
Tahunan	100% (Rp 65 M)	108,49% (74,33 M)	100% (Rp 133,1 M)	78,08% (Rp 103,92 M)	100% (Rp 82 M)

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL PURWOKERTO
KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

3a-CP

Perspektif:	Customer
Sasaran Strategis:	3-Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien
Deskripsi Sasaran Strategis:	<p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.</p> <p>Pelayanan publik yang prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (exceeding customer needs).</p> <p>Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.</p>
Indikator Kinerja Utama:	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL
Deskripsi:	<p>Definisi:</p> <p>Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (<i>quick win</i>). Survei dilakukan dengan memberikan kuisioner kepada pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan.</p> <p>Pelaksanaan survei dikoordinasikan oleh KPKNL. Hasil survei kepuasan pengguna layanan diukur dengan indeksasi sebagai berikut:</p> <p>0 ≤ x ≤ 1 = tidak puas 1 < x ≤ 2 = kurang puas 2 < x ≤ 3 = cukup puas 3 < x ≤ 4 = puas 4 < x ≤ 5 = sangat puas</p> <p>Formula:</p> <p>Capaian = Rata-rata Indeks hasil survei kepuasan pengguna layanan KPKNL</p> <p>Tujuan Strategis:</p> <p>Menjaga dan meningkatkan kualitas layanan</p>
Satuan Pengukuran:	Indeks
Jenis Aspek Target Pada SKP:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/Output <input type="checkbox"/> Kualitas/Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
Tingkat Kendali IKU:	<input type="checkbox"/> <i>High</i> <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> <i>Low</i>
Tingkat Validitas IKU:	<input checked="" type="checkbox"/> Exact <input type="checkbox"/> <i>Proxy</i> <input type="checkbox"/> <i>Activity</i>
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:	Kepala KPKNL Purwokerto
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi PKN, Seksi PN, Seksi Pelayanan Penilaian, Seksi Pelayanan Lelang
Sumber Data:	Laporan Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL
Jenis Cascading IKU:	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> <i>Cascading Non Peta</i> <input type="checkbox"/> <i>Non Cascading</i>

Metode Cascading : Direct Indirect

Jenis Konsolidasi Periode: Sum Average Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi: Sum Average Raw Data

Polarisasi: Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan: Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Konversi 120: Ya Tidak

Tabel Data

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tahunan	4.25	4.39	4.27	4.67	4.30

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL PURWOKERTO
KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

4a-CP

Perspektif: Internal Process

Sasaran Strategis: 4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang efektif

Deskripsi Sasaran Strategis: Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin **terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi**. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Indikator Kinerja Utama: 4a-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasi

Deskripsi:

Definisi:
Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

Kendali BPN	Kendali K/L	Kendali Kemenkeu
1. Melaksanakan pensertipikatan BMN; 2. Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan	1. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya; 2. Melengkapi persyaratan pensertipikatan BMN; 3. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah; 4. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertipikatkan; 5. Mengajukan permohonan sertifikasi; 6. Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi; 7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.	1. Menyimpan asli sertipikat; 2. <i>Updating</i> data BMN yang akan disertipikatkan; 3. Permintaan data BMN bersertipikat kepada BPN; 4. Pengalokasian anggaran sertifikasi

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:
1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat
2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik
3. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertipikatkan
4. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan
5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus *clean and clear* (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertipikatkan
6. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2020 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN.

Formula:

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{bidang tanah yang telah disertipikatkan}}{\sum \text{target bidang tanah yang akan disertipikatkan}} \times 100\%$$

Tujuan Strategis:
Mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam pengelolaan kekayaan negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian.

Satuan Pengukuran: Persen

Jenis Aspek Target Pada SKP: (X) Kuantitas/Output () Kualitas/Mutu () Waktu () Biaya

Tingkat Kendali IKU: () High () Moderate (X) Low

Tingkat Validitas IKU: *Exact* *Proxy* *Activity*

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU: Kepala KPKNL Purwokerto

Unit/Pihak Penyedia Data: Seksi PKN

Sumber Data: Rekapitulasi data perkembangan sertifikasi pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Tetap (SIMANTAP)

Jenis *Cascading* IKU: *Cascading Peta* *Cascading Non Peta* *Non Cascading*

Metode *Cascading* : *Direct* *Indirect*

Jenis Konsolidasi Periode: *Sum* *Average* *Take Last Known Value*

Jenis Konsolidasi Lokasi: *Sum* *Average* *Raw Data*

Polarisasi: *Maximize* *Minimize* *Stabilize*

Periode Pelaporan: *Bulanan* *Triwulanan* *Semesteran* *Tahunan*

Konversi 120: *Ya* *Tidak*

Tabel Data

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	-	-	-	-	-
Triwulan II	20%	0%	20%	98%	20%
Triwulan III	60%	117.65%	60%	100.00%	60%
Triwulan IV	100%	123.53%	100%	100.00%	100%
Tahunan	100% (17 Bidang)	123,53% (21 Bidang)	100% (93 Bidang)	100% (93 Bidang)	100% (414 Bidang)

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL PURWOKERTO
KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

**4b-
CP**

Perspektif	:	<i>Internal process</i>
Sasaran Strategis	:	4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang efektif
Deskripsi Sasaran	:	Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi . Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (<i>good governance</i>) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.
Strategis	:	
Indikator Kinerja Utama	:	4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)
Deskripsi	:	<p>Definisi: Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).</p> <p>Formula</p> $\frac{\sum \text{aset yang dievaluasi kinerjanya}}{\text{target aset yg akan dievaluasi}} \times 100\%$ <p>Tujuan Strategis: Terwujudnya struktur portofolio aset negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.</p>
Satuan Pengukuran	:	Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input type="checkbox"/> Kualitas/Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
Tingkat Kendali IKU	:	<input checked="" type="checkbox"/> High <input type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Low
Tingkat Validitas IKU	:	<input type="checkbox"/> Exact <input checked="" type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity
Unit/Pihak penanggungji:	:	Kepala KPKNL Purwokerto
Unit/Pihak penyedia data:	:	Seksi PKN
Sumber Data	:	Laporan Monitoring Evaluasi Kinerja BMN
Jenis Cascading IKU	:	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non Peta Strategi <input type="checkbox"/> Noncascading
Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Direct <input checked="" type="checkbox"/> Indirect
Jenis Konsolidasi Periode:	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value
Jenis Konsolidasi Lokasi:	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan
Konversi 120	:	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	-		-	-	15%
Triwulan II	-		-	-	45%
Triwulan III	-		80%	0%	75%
Triwulan IV	-		100%	300%	100%
Tahunan	N/A	N/A	100% (3 NUP)	300% (9 NUP)	100% (27 NUP)

Tahun 2020 mendapatkan target portofolio pada triwulan III

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL PURWOKERTO
KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

4c-CP

Perspektif :	Internal Process Perspective
Sasaran Strategis :	4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang efektif
Deskripsi Sasaran Strategis :	<p>Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.</p> <p>Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (<i>good governance</i>) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.</p>
Indikator Kinerja Utama :	4c-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian
Deskripsi :	<p>Definisi:</p> <p>Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu.</p> <p>Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).</p> <p>Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.</p> <p>Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.</p> <p>Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap</p> <p>Formula: Rata-rata Deviasi</p> $\text{Deviasi} = \frac{ A - B }{B}$ <p>A = Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan B = Nilai yang disampaikan dalam laporan penilaian untuk persetujuan = Nilai Mutlak</p> <p>contoh 1</p> <p>Hasil penilaian 100.000.000, pengelola menetapkan persetujuan sebesar 120.000.000 (misalnya usulan dari pengguna barang) maka sesuai formulasi di atas deviasinya sebesar 20%</p> <p>contoh 2</p> <p>Jika hasil penilaian 100.000.000, pengelola menetapkan persetujuan 50.000.000 dengan memberikan faktor penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan (diskon) 50% dengan basis perhitungan berdasarkan hasil penilaian 100.000.000 tersebut maka deviasinya adalah 0% (tetap nilai yang digunakan 100%)</p> <p>contoh 3</p> <p>Jika hasil penilaian 100.000.000, pengelola menetapkan persetujuan 115.000.000 dengan memberikan faktor penyesuaian berdasarkan kebijakan pengelola dengan basis perhitungan berdasarkan hasil penilaian 100.000.000 tersebut maka deviasinya adalah 0% (tetap nilai yang digunakan 100%)</p> <p>Tujuan Strategis:</p> <p>Mengukur deviasi dari nilai hasil penilaian dalam pengambilan keputusan pengelolaan BMN</p>
Satuan Pengukuran :	Persentase

Jenis Aspek Target pada SKP : Kuantitas/Output Kualitas/Mutu Waktu Biaya

Tingkat Kendali IKU : High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU : Exact Proxy Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Kepala KPKNL Purwokerto

Unit/Pihak Penyedia Data : Seksi Pelayanan Penilaian

Sumber Data : Surat Persetujuan/Penolakan Pengelolaan dan form rekapitulasi ketergunaan hasil penilaian

Jenis Cascading IKU : Cascading Peta Cascading Non Peta Non Cascading

Metode Cascading : Direct Indirect

Jenis Konsolidasi Periode : Sum Average Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi : Sum Average Raw Data

Polarisasi Indikator Kinerja : Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Konversi Indeks Capaian 120 Ya Tidak

Tabel Data

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I			30%	7.96%	22%
Triwulan II			30%	7.96%	22%
Triwulan III			30%	1.29%	22%
Triwulan IV			30%	4.43%	22%
Tahunan	N/A	N/A	30%	4.56%	22%

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL PURWOKERTO
KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

5a-CP

Perspektif :	Internal Process
Sasaran Strategis :	5.Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif
Deskripsi Sasaran Strategis :	<p>Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.</p> <p>Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.</p>
Indikator Kinerja Utama :	5a-CP Persentase Efektifitas Penyelesaian BKNP
Deskripsi :	<p>Definisi: Persentase Efektifitas Penyelesaian BKNP menggambarkan aspek kinerja pengelolaan piutang negara dari sisi penyelesaian BKNP dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKNP diukur dengan penjumlahan: 1. BKNP Lunas 2. BKNP Penarikan 3. BKNP dikembalikan, dan 4. BKNP Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).</p> <p>Formula:</p> $\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi Penyelesaian BKNP}}{\text{target Penyelesaian BKNP}} \times 100\%$ <p>Tujuan: Percepatan penyelesaian outstanding piutang negara dengan memprioritaskan penyelesaian BKNP yang sudah lama pengurusannya di PUPN</p>
Satuan Pengukuran :	Persentase
Jenis Aspek Target Pada SKP :	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/Output <input type="checkbox"/> Kualitas/Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
Tingkat Kendali IKU :	<input type="checkbox"/> High <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Low
Tingkat Validitas IKU :	<input type="checkbox"/> Exact <input checked="" type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Kepala KPKNL Purwokerto
Unit/Pihak Penyedia Data :	Seksi PN
Sumber Data :	Laporan Bulanan di Bidang Pengurusan Piutang Negara terkait PNDS, Biad, dan BKNP (Kep-96), FocusF
Jenis Cascading IKU :	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Nc <input type="checkbox"/> Non Cascading
Metode Cascading :	<input type="checkbox"/> Direct <input checked="" type="checkbox"/> Indirect
Jenis Konsolidasi Periode :	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value
Jenis Konsolidasi Lokasi :	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi IKU :	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan :	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan
Konversi 120 :	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2019			2020		2021	
	Target	Realisasi		Target %	Realisasi	Target %	
Triwulan I	-	-	-	-	10% 5.61%	25%	
Triwulan II	-	-	-	-	40% 5.61%	50%	
Triwulan III	-	-	-	-	75% 17.11%	75%	
Triwulan IV	-	-	-	-	100% 113.63%	100%	
Tahunan	N/A	N/A	N/A	N/A	100% (374 BKPN)	113,63% (419 BKPN)	100% (589 BKPN)

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL PURWOKERTO
KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

5b-CP

Perspektif:	Internal Process
Sasaran Strategis:	5.Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif
Deskripsi Sasaran Strategis:	<p>Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.</p> <p>Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.</p>
Indikator Kinerja Utama:	5b-CP Persentase produktivitas lelang
Deskripsi:	Definisi:
	Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.
	Formula:
	<p>Capaian: $\frac{\sum \text{Realisasi Frekuensi Lelang Laku} - \sum \text{Realisasi frekuensi Lelang Sukarela atau Perorangan yang laku dengan nilai pokok lelang} \leq \text{Rp } 500.000,-}{\sum \text{Realisasi Frekuensi Lelang} - \sum \text{Realisasi Frekuensi Lelang Sukarela atau Perorangan yang laku dengan nilai pokok lelang} \leq \text{Rp } 500.000,-}} \times 100\%$</p>
Tujuan Strategis:	Tujuan Strategis:
	Lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.
Satuan Pengukuran:	Persentase
Jenis Aspek Target Pada SKP:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/Output <input type="checkbox"/> Kualitas/Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
Tingkat Kendali IKU:	<input type="checkbox"/> High <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Low
Tingkat Validitas IKU:	<input type="checkbox"/> Exact <input checked="" type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab Data:	Kepala KPKNL Purwokerto
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi Pelayanan Lelang
Sumber Data:	Rekapitulasi laporan realisasi kegiatan dan hasil pelaksanaan lelang
Jenis Cascading IKU:	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non Peta <input type="checkbox"/> Non Cascading
Metode Cascading :	<input type="checkbox"/> Direct <input checked="" type="checkbox"/> Indirect
Jenis Konsolidasi Periode:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value
Jenis Konsolidasi Lokasi:	<input type="checkbox"/> Sum <input checked="" type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan
Konversi 120:	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak

Tabel Data

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target (%)
Triwulan I	15%	33.56%	15%	24.47%	15%
Triwulan II	20%	29.62%	20%	23.44%	20%
Triwulan III	25%	28.74%	25%	21.88%	25%
Triwulan IV	32%	27.90%	34%	36.85%	35%
Tahunan	32%	27.90%	34%	36.85%	35%

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL PURWOKERTO
KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

5c-CP

Perspektif: Internal Process

Sasaran Strategis 5.Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif

Deskripsi Sasaran Strategis: Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.
Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Indikator Kinerja Utama: 5c-CP Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction

Definisi:
E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. *E-auction* ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka).
Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan *e-auction* dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.
Implementasi *e-auction* meliputi:
1) Pelaksanaan Lelang *e-Auction* adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
2) *E-Conventional Auction* adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur
Contoh perhitungan realisasi:

Capaian <i>e-Auction</i> (minimal harus 80%)	Pelaksanaan <i>e-Conventional</i>	Total
82%	10%	92%
87%	5%	92%
92%	0%	92%

Ket : Agar tidak diperhitungkan frekuensi lelang yang ditargetkan pada Pejabat Lelang Kelas "

Formula:

$$\left(\frac{\sum \text{Frekuensi Lelang Tanpa Kehadiran peserta lelang}}{\sum \text{Frekuensi Lelang}} + \frac{\sum \text{Frekuensi Lelang dengan Kehadiran Peserta lelang yang uang jaminannya menggunakan virtual account}}{\sum \text{Realisasi Frekuensi lelang}} \right) \times 100\%$$

Tujuan Strategis:
 1) menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena tidak perlu kehadiran di lokasi lelang,
 2) memungkinkan peserta lelang dapat mengikuti lelang dimanapun dan kapanpun,
 3) menghilangkan intimidasi ataupun kerja sama dalam bentuk negatif,
 4) menghasilkan nilai transaksi lelang yang optimal bagi pemohon lelang sekaligus meningkatkan PNBPN lelang, dan
 5) perbaiki citra layanan lelang di hadapan para pengguna layanan

Satuan Pengukuran: Persentase

Jenis Aspek Target pada SKP: (X) Kuantitas/Output () Kualitas/Mutu () Waktu () Biaya

Tingkat Kendali IKU: () High (X) Moderate () Low

Tingkat Validitas IKU: () Exact (X) Proxy () Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU: Kepala KPKNL Purwokerto

Unit/Pihak Penyedia Data: Seksi Pelayanan Lelang

Sumber Data: Laporan realisasi kegiatan dan hasil pelaksanaan lelang

Jenis *Cascading*: **Cascading Peta** *Cascading* *Non-Cascading*

Metode *Cascading*: *Direct* ***Indirect***

Jenis Konsolidasi Periode: *Sum* *Average* ***Take Last Known Value***

Jenis Konsolidasi Lokasi: *Sum* *Average* ***Raw data***

Polarisasi: ***Maximize*** *Minimize* *Stabilize*

Periode Pelaporan: Bulanan **Triwulanan** Semesteran Tahunan

Konversi 120: Ya **Tidak**

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	10%	100%	10%	100%	92%
Triwulan III	30%	100%	30%	100%	92%
Triwulan III	50%	100%	50%	100%	92%
Triwulan IV	90%	100%	90%	100%	92%
Tahunan	90%	100%	90%	100%	92%

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL PURWOKERTO
KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

5d-CP

Perspektif:	Internal Process																																
Sasaran Strategis	5.Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif																																
Deskripsi Sasaran Strategis:	<p>Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.</p> <p>Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.</p>																																
Indikator Kinerja Utama:	5d-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN																																
Deskripsi:	<p>Definisi: PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).</p> <p>Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN, diukur dari: 1) Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi 2) Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.</p> <p>Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.</p> <p>Target Deviasi PNBPN dari Biad PPN adalah 15% Target Deviasi PNBPN dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target 12,5%</p> <p>Formula:</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Realisasi Deviasi PNBPN Biad PPN</td> <td colspan="2">Formula IKU: $(A-B) / B$</td> </tr> <tr> <td colspan="2">A: Total Data Realisasi PNBPN Biad PPN pada Aplikasi FocusPN</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B: Total Data Realisasi PNBPN Biad PPN pada Aplikasi OM SPAN/Hasil Rekon KPPN</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Realisasi Deviasi PNBPN Bea Lelang</td> <td colspan="2">Formula IKU: $(A-B) / B$</td> </tr> <tr> <td colspan="2">A: Total Data Realisasi PNBPN Bea Lelang MAP 425782 dan 425784 pada Aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B: Total Data Realisasi PNBPN Bea Lelang MAP 425782 dan 425784 pada Aplikasi OM SPAN/Hasil Rekon KPPN</td> </tr> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Perhitungan Total</th> </tr> <tr> <th>Periode Laporan</th> <th>Rumus</th> <th>Periode Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Q1:</td> <td>(Rata-rata dari Deviasi PNBPN PN + Rata-rata Deviasi PNBPN Bea Lelang) / 2</td> <td>Jan s.d. Mar 2021</td> </tr> <tr> <td>Q2</td> <td>(Rata-rata dari Deviasi PNBPN PN + Rata-rata Deviasi PNBPN Bea Lelang) / 2</td> <td>Jan s.d. Jun 2021</td> </tr> <tr> <td>Q3</td> <td>(Rata-rata dari Deviasi PNBPN PN + Rata-rata Deviasi PNBPN Bea Lelang) / 2</td> <td>Jan s.d.Sep 2021</td> </tr> <tr> <td>Q4</td> <td>(Rata-rata dari Deviasi PNBPN PN + Rata-rata Deviasi PNBPN Bea Lelang) / 2</td> <td>Jan s.d. Dec 2021</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tujuan Strategis: Akurasi penyajian Data PNBPN DJKN</p>	Realisasi Deviasi PNBPN Biad PPN	Formula IKU: $(A-B) / B$		A: Total Data Realisasi PNBPN Biad PPN pada Aplikasi FocusPN		B: Total Data Realisasi PNBPN Biad PPN pada Aplikasi OM SPAN/Hasil Rekon KPPN		Realisasi Deviasi PNBPN Bea Lelang	Formula IKU: $(A-B) / B$		A: Total Data Realisasi PNBPN Bea Lelang MAP 425782 dan 425784 pada Aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang*		B: Total Data Realisasi PNBPN Bea Lelang MAP 425782 dan 425784 pada Aplikasi OM SPAN/Hasil Rekon KPPN		Perhitungan Total			Periode Laporan	Rumus	Periode Data	Q1:	(Rata-rata dari Deviasi PNBPN PN + Rata-rata Deviasi PNBPN Bea Lelang) / 2	Jan s.d. Mar 2021	Q2	(Rata-rata dari Deviasi PNBPN PN + Rata-rata Deviasi PNBPN Bea Lelang) / 2	Jan s.d. Jun 2021	Q3	(Rata-rata dari Deviasi PNBPN PN + Rata-rata Deviasi PNBPN Bea Lelang) / 2	Jan s.d.Sep 2021	Q4	(Rata-rata dari Deviasi PNBPN PN + Rata-rata Deviasi PNBPN Bea Lelang) / 2	Jan s.d. Dec 2021
Realisasi Deviasi PNBPN Biad PPN	Formula IKU: $(A-B) / B$																																
	A: Total Data Realisasi PNBPN Biad PPN pada Aplikasi FocusPN																																
	B: Total Data Realisasi PNBPN Biad PPN pada Aplikasi OM SPAN/Hasil Rekon KPPN																																
Realisasi Deviasi PNBPN Bea Lelang	Formula IKU: $(A-B) / B$																																
	A: Total Data Realisasi PNBPN Bea Lelang MAP 425782 dan 425784 pada Aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang*																																
	B: Total Data Realisasi PNBPN Bea Lelang MAP 425782 dan 425784 pada Aplikasi OM SPAN/Hasil Rekon KPPN																																
Perhitungan Total																																	
Periode Laporan	Rumus	Periode Data																															
Q1:	(Rata-rata dari Deviasi PNBPN PN + Rata-rata Deviasi PNBPN Bea Lelang) / 2	Jan s.d. Mar 2021																															
Q2	(Rata-rata dari Deviasi PNBPN PN + Rata-rata Deviasi PNBPN Bea Lelang) / 2	Jan s.d. Jun 2021																															
Q3	(Rata-rata dari Deviasi PNBPN PN + Rata-rata Deviasi PNBPN Bea Lelang) / 2	Jan s.d.Sep 2021																															
Q4	(Rata-rata dari Deviasi PNBPN PN + Rata-rata Deviasi PNBPN Bea Lelang) / 2	Jan s.d. Dec 2021																															
Satuan Pengukuran:	Persentase																																
Jenis Aspek Target pada SKP:	(X) Kuantitas/Output () Kualitas/Mutu () Waktu () Biaya																																
Tingkat Kendali IKU:	() High (X) Moderate () Low																																
Tingkat Validitas IKU:	() Exact (X) Proxy () Activity																																

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU: Kepala KPKNL Purwokerto

Unit/Pihak Penyedia Data: Seksi Pelayanan Lelang, Seksi HI, Seksi PN

Sumber Data: Laporan Pembukuan Data PNBP DJKN dan Aplikasi FocusPN/Dropbox/OM SPAN/Aplikasi lainnya yang berlaku

Jenis Cascading: Cascading Peta Cascading Non-Cascading

Metode Cascading: Direct Indirect

Jenis Konsolidasi Periode: Sum Average Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi: Sum Average Raw data

Polarisasi: Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan: Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Konversi 120: Ya Tidak

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	12.5%
Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	12.5%
Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	12.5%
Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	12.5%
Tahunan	N/A	N/A	N/A	N/A	12.5%

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL PURWOKERTO
KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

6a-N

Perspektif: Internal Process

Sasaran Strategis: 6. Edukasi yang Efektif

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk **meningkatkan pemahaman atas proses bisnis** yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai.

Deskripsi Sasaran Strategis: Ruang lingkup edukasi adalah sebagai berikut:
1. edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi, dan
2. edukasi eksternal dari kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat umum.
Materi edukasi adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara, dan lelang.

Edukasi dapat dikatakan efektif apabila **pihak yang diedukasi memberikan feedback yang positif** atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan.

Indikator Kinerja Utama: 6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

Definisi:

Edukasi kepada pengguna jasa
Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau *workshop*. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh kanwil kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali).

Pembobotan atas empat indikator tersebut adalah sebagai berikut:
1) tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), dengan pertimbangan fokus pelaksanaan edukasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta,
2) kualitas materi (bobot 15%),
3) kualitas fasilitator (bobot 10%), dan
4) kualitas fasilitas pelatihan (bobot 5%).

Kuesioner dan cara perhitungan tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi dapat diunduh pada tautan: http://bit.ly/FormatKuesioner_KertasKerjaReviu (Tersedia kuesioner Bimbingan Teknis secara Offline dan Online)

Tingkat Efektivitas	Skala
Sangat Efektif	$86 \leq x \leq 100$
Efektif	$70 \leq x \leq 85$
Kurang efektif	$40 < x < 70$
Tidak Efektif	$20 < x \leq 40$
Sangat Tidak Efektif	$0 \leq x \leq 20$

Formula:

Capaian IKU = Rata-Rata Tingkat Efektivitas Edukasi kepada Pengguna Jasa

Tujuan Strategis:

1) meningkatkan kualitas pemahaman para pengguna layanan sehingga lebih patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh DJKN, dan
2) mengenalkan instansi DJKN kepada masyarakat

Satuan Pengukuran: Indeksasi

Jenis Aspek Target pada SKP: (X) Kuantitas/Output () Kualitas/Mutu () Waktu () Biaya

Tingkat Kendali IKU: High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU: Exact Proxy Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU: Kepala KPKNL Purwokerto

Unit/Pihak Penyedia Data: Seksi PKN, Seksi Pelayanan Lelang

Sumber Data: Hasil rekapitulasi kuisisioner

Jenis *Cascading* : *Cascading Peta* *Cascading* *Non-Cascading*

Metode *Cascading* : *Direct* *Indirect*

Jenis Konsolidasi Periode: *Sum* *Average* *Take Last Known Value*

Jenis Konsolidasi Lokasi: *Sum* *Average* Raw data

Polarisasi: *Maximize* *Minimize* *Stabilize*

Periode Pelaporan: Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Konversi 120: Ya Tidak

Tabel Data

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	-	-	-	-	-
Triwulan II	87	89.6	88	83.94	89
Triwulan III	-	-	-	-	-
Triwulan IV	87	85.41	88	94.19	89
Tahunan	87	87.51	88	89.07	89

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL PURWOKERTO
KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

7a-CP

Perspektif:	Internal Process																			
Sasaran Strategis:	7. Pengawasan dan Pengendalian Yang efektif																			
Deskripsi Sasaran Strategis:	<p>Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala.</p> <p>Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku.</p> <p>Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terselesaikannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang. Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti. 																			
Indikator Kinerja Utama:	7a-CP Persentase Tindak Lanjut Pengelolaan BMN																			
Deskripsi:	<p>Definisi:</p> <p>Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut:</p> <p>Kriteria ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Jenis Persetujuan Utilisasi</th> <th>Kriteria sudah Ditindaklanjuti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Pemanfaatan</td> <td>Sewa</td> <td>1. Surat perjanjian 2. SSBP 3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak</td> </tr> <tr> <td>Kerja Sama Pemanfaatan</td> <td>1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)</td> </tr> <tr> <td>Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna</td> <td>1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)</td> </tr> <tr> <td>Pinjam Pakai</td> <td>1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Pemindahtanganan</td> <td>Penjualan</td> <td>1. Risalah lelang atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang. 2. SSBP</td> </tr> <tr> <td>Tukar Menukar</td> <td>1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti</td> </tr> <tr> <td>Hibah</td> <td>1. Berita acara serah terima</td> </tr> </tbody> </table> <p>Formula:</p> $\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2020 s.d. semester I 2021 yang ditindaklanjuti dan oleh satker K/L}}{\text{Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2020 s.d. semester I 2021}} \times 100\%$ <p>Tujuan Strategis:</p> <p>Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN oleh pengelola barang serta meningkatkan kualitas pengelolaan BMN pada K/L</p>	Kategori	Jenis Persetujuan Utilisasi	Kriteria sudah Ditindaklanjuti	Pemanfaatan	Sewa	1. Surat perjanjian 2. SSBP 3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak	Kerja Sama Pemanfaatan	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)	Pinjam Pakai	1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima	Pemindahtanganan	Penjualan	1. Risalah lelang atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang. 2. SSBP	Tukar Menukar	1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti	Hibah	1. Berita acara serah terima
Kategori	Jenis Persetujuan Utilisasi	Kriteria sudah Ditindaklanjuti																		
Pemanfaatan	Sewa	1. Surat perjanjian 2. SSBP 3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak																		
	Kerja Sama Pemanfaatan	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)																		
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)																		
	Pinjam Pakai	1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima																		
Pemindahtanganan	Penjualan	1. Risalah lelang atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang. 2. SSBP																		
	Tukar Menukar	1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti																		
	Hibah	1. Berita acara serah terima																		

Satuan Pengukuran:

Jenis Aspek Target Pada SKP: Kuantitas/Output Kualitas/Mutu Waktu Biaya

Tingkat Kendali IKU: High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU: Exact Proxy Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:

Unit/Pihak Penyedia Data:

Sumber Data:

Jenis Cascading IKU: Cascading Peta Cascading Non Peta Non Cascading

Metode Cascading: Direct Indirect

Jenis Konsolidasi Periode: Sum Average Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi: Sum Average Raw Data

Polarisasi: Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan: Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Konversi 120: Ya Tidak

Tabel Data

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I					
Triwulan II			40%	88.57%	40%
Triwulan III					
Triwulan IV					
Tahunan	70%	85%	80%	92.86%	85%

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL PURWOKERTO
KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

8a-N

Perspektif :	Learning and growth
Sasaran Strategis :	8. SDM yang Kompeten
Deskripsi Sasaran Strategis :	SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi.
Indikator Kinerja Utama :	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai
Deskripsi Indikator Kinerja Utama :	<p>Definisi:</p> <p>mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi</p> <p>Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 24 jamlat.</p> <p>Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.</p> <p>Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya</p> <p>Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Dikecualikan dari formula IKU ini adalah: - bawahan yang akan pensiun di tahun 2021; - bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan; - bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2021; - Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2021 tidak diperhitungkan di unit barunya - Pegawai pada unit non-eselon</p> <p>Formula:</p> <p style="text-align: center;">Capaian IKU = Capaian Utama + Capaian Tambahan</p> <p style="text-align: center;">Capaian Utama = (Jumlah bawahan telah memenuhi kriteria / Jumlah Bawahan (sesuai lingkup IKU) x 100%</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Capaian Tambahan = Jumlah Bawahan telah melebihi Kriteria / Jumlah Bawahan (Sesuai Lingkup IKU) x 100%</p> <p>Tujuan</p> <p>Mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan dan juga kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan pengembangan pegawai. IKU ini bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan</p>
Satuan Pengukuran :	Persen
Jenis Aspek Target :	(X) Kuantitas () Kualitas () Waktu () Biaya

Tingkat Kendali IKU : High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU : Exact Proxy Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Kepala KPKNL Purwokerto

Unit/Pihak Penyedia Data : Subbagian Umum

Sumber Data : Pengelola kepegawaian unit, HRIS, E-Performance (modul DKI)

Jenis Cascading IKU : Cascading Peta Cascading Non Peta Non-Cascading

Metode Cascading : Direct Indirect

Jenis Konsolidasi Periode : Sum Average Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi : Sum Average

Polarisasi Indikator Kinerja : Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Konversi Indeks Capaian 120 : Ya Tidak

Tabel Data :

Periode Pelaporan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021
	Target	Realisasi	target	realisasi	Target
Q1	N/A	N/A	15%	19.53%	15%
Q2	N/A	N/A	40%	69.77%	40%
Q3	N/A	N/A	75%	117.21%	75%
Q4	N/A	N/A	100%	120%	100%
Tahunan	N/A	N/A	100%	120%	100%

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL PURWOKERTO
KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

9a-N

Perspektif:	Learning and Growth	
Sasaran Strategis:	9. Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>	
Deskripsi Sasaran Strategis:	Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i> adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi.	
Indikator Kinerja Utama:	9a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	
Deskripsi:	<p>Definisi:</p> <p>Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi – Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019.</p> <p>Menindaklanjuti PermenPAN-RB 52/2014 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019, akan dilakukan seleksi internal unit kerja yang memenuhi kriteria WBK/WBBM yang dapat direkomendasikan untuk diajukan kepada KemenPAN-RB untuk dilakukan penilaian secara nasional.</p> <p>Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan nilai komponen pengungkit minimal 75, indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5 yang terdiri dari sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5 dan sub komponen persentasi TLHP minimal 5, serta indikator terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 16.</p> <p>Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan nilai komponen pengungkit minimal 85, indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5 yang terdiri dari sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5 dan sub komponen persentasi TLHP minimal 5, serta indikator terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 18.</p> <p>Pada tahun 2020 DJKN mengusulkan 34 unit kerja untuk mengikuti penilaian WBK/WBBM, dengan rincian: - WBK : 28 unit kerja - WBBM : 6 unit kerja.</p>	
	Formula	<p>Nilai Pemenuhan = Nilai akhir (total Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil) berdasarkan hasil penilaian TPK*</p>
	Realisasi IKU dihitung dari pemenuhan Nilai Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil, dengan catatan bahwa:	<p>jika nilai total yang diperoleh ≥ 75 (untuk WBK) dan ≥ 85 (untuk WBBM), tetapi nilai untuk beberapa indikator penilaian tertentu tidak mampu mencapai nilai minimal maka capaian ditetapkan sebesar 74 (untuk WBK) dan 84 (untuk WBBM).</p>
	INDIKATOR PENILAIAN DENGAN NILAI MINIMAL	<p>Unit WBK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) komponen pengungkit minimal 40; 2) per area pengungkit minimal mencapai 60% dari bobot masing-masing area; 3) indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5; 4) hasil survei/indeks persepsi anti korupsi minimal 13,5; 5) persentasi TLHP minimal 5; 6) hasil survei/indeks pelayanan publik minimal 16. <p>Unit WBBM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) komponen pengungkit minimal 48; 2) per area pengungkit minimal mencapai 75% dari bobot masing-masing area; 3) indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5; 4) hasil survei/indeks persepsi anti korupsi minimal 13,5; 5) persentasi TLHP minimal 5; 6) hasil survei/indeks pelayanan publik minimal 18.
	Tujuan Strategis:	Meningkatkan citra Kementerian Keuangan dari aspek pemberantasan korupsi
Satuan Pengukuran:	Persentase	

Jenis Aspek Target Pada SKP: Kuantitas Kualitas Waktu Biaya

Tingkat Kendali IKU: High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU: Exact Proxy Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU: KPKNL Purwokerto

Unit/Pihak Penyedia Data: Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM KPKNL Purwokerto

Sumber Data:

- Surat hasil self assessment Tim Penilai Unit Eselon I
- Surat hasil penilaian Tim Penilai Kementerian

Jenis Cascading IKU: Cascading Peta Cascading Non-peta Non-Cascading

Metode Cascading: Direct Indirect

Jenis Konsolidasi Periode: Sum Average Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi: Sum Average Raw data

Polarisasi: Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan: Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Konversi 120: Ya Tidak

Tabel Data

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	-	-	-	-	-
Triwulan III	-	-	-	-	-
Triwulan III	-	-	-	-	-
Triwulan IV	-	-	-	-	85
Tahunan	N/A	N/A	N/A	N/A	85

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL PURWOKERTO
KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

9b-N

Perspektif:

Sasaran Strategis:

Deskripsi Sasaran Strategis:

Indikator Kinerja Utama:

Definisi:
Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	25%
2	Pelaksanaan/eksekusi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
3	Monitoring dan Evaluasi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
4	Intensitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	15%
TOTAL		100%

Deskripsi:

Nilai	Predikat
$90 \leq X \leq 100$	Kami mengelola kinerja dengan sangat baik
$80 \leq X < 90$	Kami mengelola kinerja dengan baik
$70 \leq X < 80$	Kami mengelola kinerja dengan cukup baik
$50 \leq X < 70$	Kami mengelola kinerja dengan kurang baik
< 50	Kami mengelola kinerja dengan tidak baik

Formula:

Tujuan Strategis:

Satuan Pengukuran:

Jenis Aspek Target Pada SKP: Kuantitas/Output Kualitas Waktu Biaya

Tingkat Kendali IKU: High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU: Exact Proxy Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:

Unit/Pihak Penyedia Data:

Sumber Data:

Jenis Cascading IKU: Cascading Peta Cascading Non-peta Non-Cascading

Metode Cascading: Direct Indirect

Jenis Konsolidasi Periode: Sum Average Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi: Sum Average Raw data

Polarisasi: *Maximize* *Minimize* *Stabilize*

Periode Pelaporan: Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Konversi 120: Ya Tidak

Tabel Data

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	-	-	-	-	-
Triwulan III	-	-	-	-	-
Triwulan III	-	-	-	-	-
Triwulan IV	-	-	70	95.96	75
Tahunan	N/A	N/A	70	95.96	75

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL PURWOKERTO
KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

9c-N

Perspektif :	Learning and Growth																																														
Sasaran Strategis :	9. Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>																																														
Deskripsi Sasaran Strategis :	Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i> adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (<i>value chain</i>) yang selaras dengan tujuan organisasi.																																														
Indikator Kinerja Utama :	9c-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator																																														
Deskripsi :	<p>Definisi: Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai kecepatan pelaksanaan FGD dan feedback peserta (pegawai di bawah koordinasi Pejabat Administrator terkait) terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.</p> <p>Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO). Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan <i>Forum Group Discussion</i>. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran efektivitas pelaksanaan FGD untuk seluruh tema yang ditetapkan oleh Setjen mengacu pada manual IKU ini.</p> <p>Formula:</p> <p>Parameter yang diukur berdasarkan dua aspek yaitu: 1) kecepatan (seberapa cepat materi FGD disampaikan kepada pegawai sejak pelaksanaan Pra-FGD). 2) feedback peserta yang terdiri dari content, delivery, dan contribution.</p> <p>Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui: 1) Data pelaksanaan FGD yang ada di e-performance masing-masing Pejabat Administrator, dan 2) kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO).</p> <p>Aspek yang diukur dengan kuesioner (feedback) dari peserta (bawahan) yaitu: 1. Content (topik materi dan pesan yang disampaikan); 2. Delivery (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator); 3. Contribution (dampak kegiatan FGD terhadap peningkatan kapasitas pegawai).</p> <p>Contoh rincian pertanyaan kuesioner untuk menggali beberapa aspek di atas adalah: 1. Content a. Relevansi topik dengan isu terkini di Kementerian Keuangan maupun sektor publik di Indonesia. b. Pesan inti dari materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik. 2. Delivery a. Pemateri menguasai topik yang dibawakan. b. Terjadi dialog interaktif dan pemateri mampu menjawab pertanyaan. 3. Contribution a. Materi yang disampaikan meningkatkan kapasitas pegawai. b. Secara keseluruhan, kegiatan FGD bermanfaat.</p> <p>Kuesioner bisa disusun dalam bentuk pertanyaan dengan opsi pilihan 'sangat tidak setuju' sampai dengan 'sangat setuju' (dengan skala 1 s.d. 10). Kemudian nilai akhir hasil rata-rata setiap aspek yang dinilai dikonversi ke skala 100.</p> <p>Indeks efektivitas setiap pelaksanaan FGD Pejabat Administrator adalah rata-rata dari dua parameter sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>1. Kecepatan</th> <th>No</th> <th>Nilai/Angka</th> <th>pelaksanaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>100</td> <td>≤3 hari kerja</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>90</td> <td>4 - 7 hari kerja</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>80</td> <td>8 - 10 hari kerja</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>70</td> <td>>10 hari kerja</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>0</td> <td>tidak melaksanakan FGD</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>2. Feedback peserta</td> <td colspan="3">Rata-rata nilai kuesioner feedback peserta FGD</td> </tr> <tr> <td>Efektivitas</td> <td colspan="3">(40% x nilai kecepatan) + (60% x nilai feedback peserta)</td> </tr> <tr> <td>Indeks efektivitas</td> <td>No</td> <td>Nilai/Angka</td> <td>Interpretasi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>90 ≤ x ≤ 100</td> <td>Sangat Efektif</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>80 ≤ x ≤ 89</td> <td>Efektif</td> </tr> </tbody> </table>			1. Kecepatan	No	Nilai/Angka	pelaksanaan		1	100	≤3 hari kerja		2	90	4 - 7 hari kerja		3	80	8 - 10 hari kerja		4	70	>10 hari kerja		5	0	tidak melaksanakan FGD	2. Feedback peserta	Rata-rata nilai kuesioner feedback peserta FGD			Efektivitas	(40% x nilai kecepatan) + (60% x nilai feedback peserta)			Indeks efektivitas	No	Nilai/Angka	Interpretasi		1	90 ≤ x ≤ 100	Sangat Efektif		2	80 ≤ x ≤ 89	Efektif
1. Kecepatan	No	Nilai/Angka	pelaksanaan																																												
	1	100	≤3 hari kerja																																												
	2	90	4 - 7 hari kerja																																												
	3	80	8 - 10 hari kerja																																												
	4	70	>10 hari kerja																																												
	5	0	tidak melaksanakan FGD																																												
2. Feedback peserta	Rata-rata nilai kuesioner feedback peserta FGD																																														
Efektivitas	(40% x nilai kecepatan) + (60% x nilai feedback peserta)																																														
Indeks efektivitas	No	Nilai/Angka	Interpretasi																																												
	1	90 ≤ x ≤ 100	Sangat Efektif																																												
	2	80 ≤ x ≤ 89	Efektif																																												

	3	$70 \leq x \leq 79$	Cukup Efektif
	4	$60 \leq x \leq 69$	Kurang efektif
	5	< 60	Tidak Efektif

Tujuan:
Mengukur efektivitas FGD Pejabat Administrator

Satuan Pengukuran : Indeks

Jenis Aspek Target pada SKP : Kuantitas Kualitas Waktu Biaya

Tingkat Kendali IKU : High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU : Exact Proxy Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Pejabat Administrator / Eselon III (Kepala KPKNL Purwokerto)

Unit/Pihak Penyedia Data : Pejabat Administrator / Eselon III (Kepala KPKNL Purwokerto)

Sumber Data : Hasil Kuesioner

Jenis Cascading IKU: Cascading Peta Cascading Non peta Non-Cascading

Metode Cascading : Direct Indirect

Jenis Konsolidasi Periode : Sum Average Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi : Sum Average Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja : Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Konversi 120 : Ya Tidak

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I					80
Triwulan II			80	91.60	80
Triwulan III			80	96.70	80
Triwulan IV			80	94.30	80
Tahunan			80	94.20	80

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL PURWOKERTO
KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

10a-CP

Perspektif :	<i>Learning and Growth</i>
Sasaran Strategis :	10.Pengelolaan Keuangan yang Optimal
Deskripsi Sasaran Strategis :	Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi
Indikator Kinerja Utama :	10a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Deskripsi :	<p>Definisi: Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.</p> <p>Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.</p> <p>Definisi masing-masing indikator mengacu pada SE-8/MK.1/2020 terkait Tata Cara perhitungan IKU PKPA lingkup Kemenkeu.</p> <p>Formula: Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan ini mengacu pada SE-8/MK.1/2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.</p> <p>Q1, Q2 dan Q3 = 100% x IKPA Q4= (60% x SMART + 40% x IKPA)</p> <p>Tujuan: Memberikan panduan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan agar dalam melakukan perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berpedoman pada tata cara perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) nomor SE-2/MK.1/2019 tanggal 11 Maret 2019.</p>
Satuan Pengukuran :	Persentase
Jenis Aspek Target :	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/Output () Kualitas/Mutu () Waktu () Biaya
Tingkat Kendali IKU :	() High <input checked="" type="checkbox"/> Moderate () Low
Tingkat Validitas IKU :	() Exact <input checked="" type="checkbox"/> Proxy () Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Kepala KPKNL Purwokerto
Unit/Pihak Penyedia Data :	Subbagian Umum
Sumber Data :	Laporan realisasi anggaran KPKNL Purwokerto, SMART-DJA, IKPA DJPB, OMSPAN
Jenis Cascading IKU:	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta () Cascading Non peta () Non-Cascading
Metode Cascading :	() <i>Direct</i> <input checked="" type="checkbox"/> Indirect
Jenis Konsolidasi Periode :	() Sum () Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value
Jenis Konsolidasi Lokasi :	() Sum () Average <input checked="" type="checkbox"/> Raw data
Polarisasi Indikator Kinerja :	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan :	() Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan () Semesteran () Tahunan

Konversi Indeks Capaian 120:

() Ya

(x) Tidak

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	-	-			95.50%
Triwulan II	-	-			95.50%
Triwulan III	-	-	95%	100%	95.50%
Triwulan IV	-	-	95%	97.80%	95.50%
Tahunan	-	-	95%	97.80%	95.50%

**LEMBAR PENETAPAN
PERUBAHAN MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Bersama ini ditetapkan kembali manual IKU Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto untuk periode Kontrak Kinerja tahun 2021 yang mengalami perubahan pada manual IKU:


- a. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP);

Raw Data sebelumnya	Menjadi
Rp. 8.445.100.000,00	Rp. 8.450.000.000,00

- b. Persentase Penurunan Nilai *Outstanding* Piutang Negara;

Raw Data sebelumnya	Menjadi
Rp. 359.254.343,00	Rp. 450.000.000,00

Kepala Seksi Kepatuhan Internal,



Wirta

NIP 197312251994021001

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 31 Juli 2021

Kepala KPKNL Purwokerto,



Soeparjanto

NIP 197004291996031001

**ADDENDUM MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL PURWOKERTO
KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

1c-CP

Perspektif :	Stakeholder
Sasaran Strategis :	1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal
Deskripsi Sasaran Strategis :	<p>Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.</p> <p>Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND; 2) pengurusan piutang negara; dan 3) pelayanan lelang. <p>Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle) 2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBP (revenue generating). 3). Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum) 4). Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.
Indikator Kinerja Utama :	1c-CP Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara
Deskripsi :	<p>Definisi:</p> <p>IKU Tingkat <i>Outstanding</i> Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara diperoleh dari penurunan <i>outstanding</i> piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan <i>outstanding</i> masing-masing KPKNL di wilayahnya.</p> <p>Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk BKPN dengan SP3N s.d 31 Desember 2017, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angsuran 2. Pelunasan 3. Penarikan/ Pengembalian 4. Pelunasan 5. PSBDT <p>Formula :</p> $\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi Penurunan Nilai Outstanding PN}}{\text{Target Penurunan Nilai Outstanding PN}} \times 100\%$ <p>Tujuan:</p> <p>Percepatan penyelesaian <i>outstanding</i> piutang negara per 31 Desember 2017 yang dikelola tahun 2021</p>
Satuan Pengukuran :	Persentase
Jenis Aspek Target Pada SKP :	(X) Kuantitas/Output () Kualitas/Mutu () Waktu
Tingkat Kendali IKU :	() High (X) Moderate () Low
Tingkat Validitas IKU :	() Exact (X) Proxy () Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Kepala KPKNL Purwokerto
Unit/Pihak Penyedia Data :	Seksi PN

Sumber Data :

Jenis Cascading IKU : **Cascading Peta** *Cascading Non Peta* *Non Cascading*

Metode Cascading : *Direct* **Indirect**

Jenis Konsolidasi Periode : *Sum* *Average* **Take Last Known Value**

Jenis Konsolidasi Lokasi : *Sum* *Average* **Raw Data**

Polarisasi IKU : **Maximize** *Minimize* *Stabilize*

Periode Pelaporan : *Bulanan* **Triwulanan** *Semesteran* *Tahunan*

Konversi 120 : *Ya* **Tidak**

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	-	-	0,5%	0.19%	25%
Triwulan II	-	-	1%	0.19%	50%
Triwulan III	-	-	2%	1.25%	75%
Triwulan IV	-	-	3%	4.26%	100%
Tahunan	N/A	N/A	3% (Rp. 299.478.801,18)	4.26% (Rp. 425.387.488,00)	100% (Rp 450.000.000,00)

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL PURWOKERTO
KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

1c-CP

Perspektif :	Stakeholder
Sasaran Strategis :	1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal
Deskripsi Sasaran Strategis :	<p>Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.</p> <p>Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND; 2) pengurusan piutang negara; dan 3) pelayanan lelang. <p>Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle) 2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBPN (revenue generating). 3). Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum) 4). Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.
Indikator Kinerja Utama :	1c-CP Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara
Deskripsi :	<p>Definisi:</p> <p>dari penagihan piutang negara. Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara diperoleh dari penurunan <i>outstanding</i> piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan <i>outstanding</i> masing-masing KPKNL di wilayahnya.</p> <p>Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk BKPN dengan SP3N s.d 31 Desember 2017, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angsuran 2. Pelunasan 3. Penarikan/ Pengembalian 4. Pelunasan 5. PSBDT 6. Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun 2021. <p>Formula :</p> $\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi Penurunan Nilai Outstanding}}{\text{Target Penurunan Nilai Outstanding PN}} \times 100\%$ <p>Tujuan:</p> <p>Percepatan penyelesaian <i>outstanding</i> piutang negara per 31 Desember 2017 yang dikelola tahun 2021</p>
Satuan Pengukuran :	Persentase
Jenis Aspek Target Pada SKP :	(X) Kuantitas/Output () Kualitas/Mutu () Waktu
Tingkat Kendali IKU :	() High (X) Moderate () Low
Tingkat Validitas IKU :	() Exact (X) Proxy () Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Kepala KPKNL Purwokerto
Unit/Pihak Penyedia Data :	Seksi PN

Sumber Data :

Jenis Cascading IKU : **Cascading Peta** *Cascading Non Peta* *Non Cascading*

Metode Cascading : *Direct* **Indirect**

Jenis Konsolidasi Periode : *Sum* *Average* **Take Last Known Value**

Jenis Konsolidasi Lokasi : *Sum* *Average* **Raw Data**

Polarisasi IKU : **Maximize** *Minimize* *Stabilize*

Periode Pelaporan : *Bulanan* **Triwulanan** *Semesteran* *Tahunan*

Konversi 120 : *Ya* **Tidak**

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	-	-	0,5%	0.19%	25%
Triwulan II	-	-	1%	0.19%	50%
Triwulan III	-	-	2%	1.25%	75%
Triwulan IV	-	-	3%	4.26%	100%
Tahunan	N/A	N/A	3% (Rp. 299.478.801,18)	4.26% (Rp. 425.387.488,00)	100% (Rp 359.254.343)

**ADDENDUM MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL PURWOKERTO
KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

1b-CP

Perspektif: Stakeholder

Sasaran Strategis: 1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

Deskripsi Sasaran Strategis: Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- 2) pengurusan piutang negara; dan
- 3) pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- 1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle)
- 2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBP (revenue generating).
- 3). Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)
- 4). Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

Indikator Kinerja Utama: 1b-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Deskripsi:

Definisi:

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara.

Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

1). PNBP BMN
 Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai *cost* yang dikeluarkan dan *revenue* diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan **telah disetorkan ke kas negara**)
- b. pemanfaatan barang milik negara; dan
- c. pemindahtanganan barang milik negara.

yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara.

2). PNBP Piutang Negara (PNBP PN)
 Nilai pengurusan piutang negara berupa **biaya administrasi pengurusan piutang negara** yang diupayakan oleh KPKNL.

3). PNBP Lelang
 Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa:

- a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian
- b. bea lelang batal atas permintaan penjual,
- c. biaya permohonan lelang,
- d. uang jaminan pembeli wanprestasi,
- e. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan terkait Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar

Target PNBPN Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Purwokerto Tahun 2021 :

- a. PNBPN BMN = Rp. 4.150.000.000,00
- b. PNBPN PN = Rp. 14.000.000,00
- c. PNBPN Lelang = Rp. 4.286.000.000,00

Formula:

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi PNBPN Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang}}{\text{Target Total PNBPN Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang}} \times 100\%$$

Tujuan Strategis:

Optimalisasi penerimaan dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

Satuan Pengukuran:

Persentase

Jenis Aspek Target Pada SKP:

Kuantitas/Output Kualitas/Mutu Waktu Biaya

Tingkat Kendali IKU:

High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU:

Exact Proxy Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:

Kepala KPKNL Purwokerto

Unit/Pihak Penyedia Data:

Seksi PKN, Seksi PN, Seksi Pelayanan Lelang

Sumber Data:

Data rekapitulasi nilai PNBPN yang berasal dari Dirjen Perbendaharaan (SPAN)

Jenis Cascading IKU:

Cascading Peta Cascading Non Peta Non Cascading

Metode Cascading:

Direct Indirect

Jenis Konsolidasi Periode:

Sum Average Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi:

Sum Average Raw Data

Polarisasi:

Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan:

Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Konversi 120:

Ya Tidak

Tabel Data

Periode Pelaporan	2019		2020		2020
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	5%	15%	5%	11%	10%
Triwulan II	30%	23%	30%	27%	30%
Triwulan III	60%	39%	60%	44%	60%
Triwulan IV	100%	147%	100%	84%	100%
Tahunan	100% (Rp 25.417.760.241)	Rp46,770,153,425	100% (Rp 11.493.919.150)	Rp9,665,762,915	100% (Rp 8.450.000.000)

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
KEPALA KPKNL PURWOKERTO
KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

1b-CP

Perspektif:

Stakeholder

Sasaran Strategis:

1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal
--

Deskripsi Sasaran Strategis: Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- 2) pengurusan piutang negara; dan
- 3) pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- 1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle)
- 2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBP (revenue generating).
- 3). Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)
- 4). Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

Indikator Kinerja Utama:

1b-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
--

Deskripsi:

Definisi:

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara.

Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

1). PNBP BMN

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai *cost* yang dikeluarkan dan *revenue* diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan **telah disetorkan ke kas negara**)
- b. pemanfaatan barang milik negara; dan
- c. pemindahtanganan barang milik negara.

yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara

2). PNBP Piutang Negara (PNBP PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa **biaya administrasi pengurusan piutang negara** yang diupayakan oleh KPKNL.

3). PNBP Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa:

- a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian
- b. bea lelang batal atas permintaan penjual,
- c. biaya permohonan lelang,
- d. uang jaminan pembeli wanprestasi,
- e. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan terkait Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar

Target PNBPN Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Purwokerto Tahun 2021 :

- a. PNBPN BMN = Rp. 4.150.000.000,00
- b. PNBPN PN = Rp. 9.100.000,00
- c. PNBPN Lelang = Rp. 4.286.000.000,00

Formula:

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi PNBPN Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang}}{\text{Target Total PNBPN Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang}} \times 100\%$$

Tujuan Strategis:

Optimalisasi penerimaan dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

Satuan Pengukuran:

Persentase

Jenis Aspek Target Pada SKP:

Kuantitas/Output Kualitas/Mutu Waktu Biaya

Tingkat Kendali IKU:

High **Moderate** Low

Tingkat Validitas IKU:

Exact **Proxy** Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:

Kepala KPKNL Purwokerto

Unit/Pihak Penyedia Data:

Seksi PKN, Seksi PN, Seksi Pelayanan Lelang

Sumber Data:

Data rekapitulasi nilai PNBPN yang berasal dari Dirjen Perbendaharaan (SPAN)

Jenis Cascading IKU:

Cascading Peta Cascading Non Peta Non Cascading

Metode Cascading:

Direct **Indirect**

Jenis Konsolidasi Periode:

Sum Average **Take Last Known Value**

Jenis Konsolidasi Lokasi:

Sum Average **Raw Data**

Polarisasi:

Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan:

Bulanan **Triwulanan** Semesteran Tahunan

Konversi 120:

Ya **Tidak**

Tabel Data

Periode Pelaporan	2019		2020		2020
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	5%	15%	5%	11%	10%
Triwulan II	30%	23%	30%	27%	30%
Triwulan III	60%	39%	60%	44%	60%
Triwulan IV	100%	147%	100%	84%	100%
Tahunan	100% (Rp 25.417.760.241)	Rp46,770,153,425	100% (Rp 11.493.919.150)	Rp9,665,762,915	100% (Rp 8.445.100.000)

NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO
PERIODE TRIWULAN IV
TAHUN 2021

Kode	IKU	V/C	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(25%)							30,00%	
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							120,00%	
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	62%	76,63%	19%	40%	123,60%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	130,05%	14%	30%	130,05%	120,00%	hijau
1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	162%	14%	30%	162,16%	120,00%	hijau
	Customer Perspective(15%)							17,06%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							116,33%	
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	P/H	88,00	98,26	11%	44%	111,66%	111,66%	hijau
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	174,36%	14%	56%	174,36%	120,00%	hijau
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							111,16%	
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4,3	4,78	21%	100%	111,16%	111,16%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)							33,15%	
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							120,00%	
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	124,40%	19%	43%	124,40%	120,00%	hijau
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	122,22%	11%	25%	122,22%	120,00%	hijau
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	0,23%	14%	32%	198,95%	120,00%	hijau
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							112,25%	
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	P/M	100%	106,96%	14%	25%	106,96%	106,96%	hijau
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	35,00%	39,67%	14%	25%	113,34%	113,34%	hijau
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92,00%	100,00%	14%	25%	108,70%	108,70%	hijau
5d-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	P/M	12,50%	0,01%	14%	25%	199,96%	120,00%	hijau
6	Edukasi yang efektif							105,07%	
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	89	93,51	14%	100%	105,07%	105,07%	hijau
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							104,72%	
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	89,01%	14%	100%	104,72%	104,72%	hijau
	Learning & Growth Perspective (30%)							33,87%	
8	SDM yang kompeten							120,00%	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%	hijau
9	Organisasi yang fit for purpose							118,16%	
9a-N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	P/M	85	97,31	14%	33%	114,48%	114,48%	hijau
9b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M	75	94,25	14%	33%	125,67%	120,00%	hijau
9c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	80	97,83	14%	33%	122,29%	120,00%	hijau
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							100,51%	
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	95,99%	14%	100%	100,51%	100,51%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								114,08%	hijau

Mengetahui,
Kepala KPKNL Purwokerto



Soeparjanto
NIP 197004291996031001

Kepala Seksi Kepatuhan Internal
Selaku Mitra Manajer Kinerja Organisasi



Wirta
NIP 197312251994021001

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO
KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA
TAHUN 2021**

SS	IKU	V/C	Uraian IKU	Target Tahun 2021	Realisasi							
					Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1			Pengelolaan kekayaan negara yang optimal									
	1a-CP	P/L	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%								
			a. Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru (2021)	Bobot 75%								
			b. Monev Tingkat Kesesuaian SBSK Th 2020	Bobot 25%								
			Capaian IKU									
	1b-CP	P/M	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	MAX/TLK								
	a.		PNBP Pengelolaan BMN	Rp4.150.000.000	Rp 727.168.469	Rp 2.881.464.575	Rp 2.881.464.575	Rp 3.491.191.564	Rp 3.491.191.564	Rp 6.732.565.774	Rp 6.732.565.774	
	b.		PNBP Piutang Negara	Rp14.000.000	Rp 886.615	Rp 12.144.387	Rp 12.144.387	Rp 13.340.175	Rp 13.340.175	Rp 48.881.625	Rp 48.881.625	
	c.		PNBP Lelang	Rp4.286.000.000	Rp 807.267.695	Rp 1.909.912.274	Rp 1.909.912.274	Rp 2.694.505.972	Rp 2.694.505.972	Rp 4.207.585.155	Rp 4.207.585.155	
			Jumlah target/realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Rp8.450.000.000	Rp 1.535.322.779	Rp 4.803.521.236	Rp 4.803.521.236	Rp 6.199.037.711	Rp 6.199.037.711	Rp 10.989.032.554	Rp 10.989.032.554	
			Capaian IKU		18,17%	56,85%	56,85%	73,36%	73,36%	130,05%	130,05%	
	1c-CP	P/M	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PND5 s.d 2017)	MAX/TLK								
			Target/Realisasi	Rp450.000.000	Rp19.773.094	Rp399.142.589	Rp 399.142.589	Rp 493.265.884	Rp 493.265.884	Rp 729.738.023	Rp 729.738.023	
			CAPAIAN IKU		4,39%	88,70%	88,70%	109,61%	109,61%	162,16%	162,16%	
			Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa									
	2a-CP	P/H	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	MAX/AVG								
			Target/Realisasi	88	97,96	99,10	98,53	99,28	98,78	96,69	98,26	
			Capaian IKU		97,96	99,10	98,53	99,28	98,78	96,69	98,26	
	2b-CP	P/M	Persentase realisasi pokok lelang	MAX/TLK								
			Pokok Lelang Kelas I	Rp47.000.000.000	Rp9.499.667.168	Rp21.708.349.145	Rp 21.708.349.145	Rp34.126.177.779	Rp 34.126.177.779	Rp62.787.880.308	Rp 62.787.880.308	

